

**PERAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2018–2025**

SKRIPSI



OLEH :

DIANYA MUTIARA RAMADHANI

(220502110119)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2026

**PERAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2018–2025**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi

Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

DIANYA MUTIARA RAMADHANI

NIM : 220502110119

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM MALANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE
2018–2025

SKRIPSI

Oleh

Dianya Mutiara Ramadhani

NIM : 220502110119

Telah Disetujui Pada Tanggal 19 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

NIP. 199211012019032020

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018–2025

SKRIPSI

Oleh

DIANYA MUTIARA RAMADHANI

NIM : 220502110119

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Dr. Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A
NIP. 197510302023212004



2 Anggota Penguji

Sri Andriani, M.Si
NIP. 197503132009122001



3 Sekretaris Penguji

Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
NIP. 199211012019032020



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Kholilah, M.S.A
NIP. 198707192019032010

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Dianya Mutiara Ramadhani
NIM	220506110119
Fakultas/Jurusan	Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2025" adalah hasil karya sendiri bukan "duplikat" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada yang "klaim" dari pihak lain bukan tanggungjawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggungjawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Juni 2026

Hormat saya,



Dianya Mutiara Ramadhani

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, kenikmatan, karunia, dan kesempatan pendidikan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini secara tepat waktu.

Besar harapan yang selalu penulis panjatkan, agar kenikmatan ilmu ini tidak usai di masa sekarang, namun dapat menjadi pintu kenikmatan-kenikmatan lain di masa depan. Bukan pula menjadi kenikmatan terbatas pada diri sendiri, tetapi berharap ilmu ini memiliki manfaat untuk orang lain.

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang-orang tercinta

Ayah dan Ibu tercinta, sebagai orang tua yang hebat dan sabar. Terima kasih atas do'a, cinta, kasih sayang yang tak terhingga, serta selalu menjadi "rumah" untuk tempat bercerita. Beribu-ribu kata terima kasih tidak akan cukup untuk membalas semua kebaikan ayah dan ibu. Namun, dengan beribu do'a, semoga semua kebaikan itu mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Kakak perempuan tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dan kebersamaan yang selalu menguatkan dalam setiap perjalanan hidup. Percayalah, saya bangga atas semua usaha mereka sampai detik ini.

Seluruh sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama ini

Bapak dan Ibu dosen Akuntansi UIN Malang. Terima kasih atas ribuan ilmu maupun motivasi yang selalu diberikan.

MOTTO

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)

"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts."

— Winston Churchill

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Peran Struktur Kepemilikan Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025 ” dapat diselesaikan secara tepat waktu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Kholilah, SE., MSA., Ak., CA., CFA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Novi Lailiyul Wafiroh, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penulisan skripsi ini dengan baik dan sabar.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah dan Ibu tercinta, Djoko dan Ninik yang selalu memberikan do’a, dukungan, semangat serta support dalam hal materil maupun moril kepada penulis.
7. Kakak perempuan tercinta, Anindya Rizqi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
8. Pakdhe, Budhe, Om, Tante dan seluruh Sepupu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, do’a dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Kota Malang
9. Para Sahabat, Elok Vayqoh Hemi Putri dan Siti Noer Afifah yang selalu menemani penulis mulai dari mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir.

10. Seluruh teman-teman Program Studi Akuntansi angkatan 2022, yang berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu, yang terlibat dalam perjalanan penyusunan skripsi dan selama perjalanan mencari ilmu sampai saat ini.

Tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dapat penulis ucapkan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata “sempurna”. Namun, penulis tetap berharap bahwa skripsi dapat memberikan kebermanfaatan bagi para pembaca maupun bagi penulis sendiri, Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
خلاصة	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.2. Kajian Teori	27
2.2.1 Teori Agensi	27
2.2.2 Teori <i>Stakeholder</i>	29
2.2.3 <i>Tax Avoidance</i>	29
2.2.4 Kepemilikan Pemerintah	31
2.2.5 Kepemilikan Direksi	32
2.2.6 Kepemilikan Institusional	33
2.2.7 Kepemilikan Manajerial	34
2.2.8 Kepemilikan Asing	34
2.2.9 Kepemilikan Keluarga	35
2.2.10 Koneksi Politik	36
2.2.11 <i>Tax Avoidance</i> dalam perspektif Islam	37
2.3. Kerangka Konseptual	39

2.4.	Hipotesis	40
2.4.1	Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap <i>Tax Avoidance</i>	40
2.4.2	Pengaruh Kepemilikan Direksi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	41
2.4.3	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	42
2.4.4	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	43
2.4.5	Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Tax Avoidance</i>	44
2.4.6	Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap <i>Tax Avoidance</i>	45
2.4.7	Pengaruh Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	46
BAB III	METODE PENELITIAN	48
3.1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
3.2.	Lokasi Penelitian.....	48
3.3.	Populasi dan Sampel.....	49
3.3.1.	Populasi.....	49
3.3.2.	Sampel.....	49
3.4.	Teknik Pengumpulan Sampel	49
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	50
3.6.	Data dan Jenis Data.....	50
3.7.	Definisi Operasional Variabel	51
3.7.1.	Variabel Dependen.....	51
3.7.2.	Variabel Independen.....	52
3.7.2.1.	Kepemilikan Pemerintah.....	52
3.7.2.2.	Kepemilikan Direksi	52
3.7.2.3.	Kepemilikan Institusional	53
3.7.2.4.	Kepemilikan Manajerial.....	53
3.7.2.5.	Kepemilikan Asing	54
3.7.2.6.	Kepemilikan Keluarga	54
3.7.2.7.	Koneksi Politik	54
3.8.	Analisis Data.....	56
3.8.1.	Statistik Deskriptif	56
3.8.2.	Analisis Pemilihan Model	57
3.8.2.1.	Uji <i>Chow</i>	57
3.8.2.2.	Uji <i>Hausman</i>	58

3.8.2.3. Uji <i>Langrange Multiplier (LM)</i>	58
3.8.3. Analisis Regresi Data Panel	59
3.8.4. Uji Asumsi Klasik.....	59
3.8.4.1. Uji <i>Multikolinearitas</i>	59
3.8.5. Uji Hipotesis.....	60
3.8.5.1. Uji <i>t</i>	60
3.8.5.2. Uji <i>F</i>	60
3.8.5.3. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1. Hasil Penelitian.....	63
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	63
4.1.2. Analisis statistik deskriptif.....	63
4.1.3. Uji pemilihan model	65
4.1.3.1. Uji Chow.....	65
4.1.3.2. Uji Hausman	65
4.1.3.3. Uji <i>Langrange Multiplier</i>	65
4.1.4. Uji asumsi klasik	67
4.1.4.1. Uji Normalitas.....	67
4.1.4.2. Uji <i>Multikolinearitas</i>	67
4.1.4.3. Uji <i>Heteroskedasitas</i>	68
4.1.5. Analisis Regresi Data Panel.....	70
4.1.6. Uji Hipotesis	70
4.1.6.1. Uji Signifikan Parameter Individual.....	70
4.1.6.2. Uji Simultan.....	72
4.1.6.3. Uji Koefisien Determinasi	72
4.2. Pembahasan.....	73
4.2.1. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap <i>Tax Avoidance</i>	73
4.2.2. Pengaruh Kepemilikan Direksi terhadap <i>Tax Avoidance</i>	74
4.2.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	75
4.2.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Tax Avoidance</i>	76
4.2.5. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap <i>Tax Avoidance</i>	78
4.2.6. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap <i>Tax Avoidance</i>	79
4.2.7. Pengaruh Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	80

BAB V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.1 Distribusi Sampel.....	50
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.	55
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.2 Uji Chow.....	65
Tabel 4.3 Uji Hausman	66
Tabel 4.4 Uji Langrange Multiplier	66
Tabel 4.5 Uji Normalitas	67
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.7 Uji Heteroskedastitas.....	68
Tabel 4.8 Regresi Data Panel	55
Tabel 4.9 Uji t.....	70
Tabel 4.10 Uji F	71
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.	39
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel Data.	92
Lampiran Deskriptif Statistik.	99
Lampiran Uji Chow.	99
Lampiran Uji Hausman.	99
Lampiran Uji Langrange Multiplier.	100
Lampiran Uji Normalitas.	100
Lampiran Uji Multikolinearitas.	100
Lampiran Uji Heteroskedasititas	100
Lampiran Uji t.	100
Lampiran Uji F.	101
Lampiran Uji Koefisien Determinasi.	101
Lampiran Populasi	103
Lampiran Sampel.....	103
Lampiran Biodata Penulis.	109
Lampiran Jurnal Bimbingan.	110
Lampiran Surat Bebas Plagiarisme.....	111

ABSTRAK

Dianya Mutiara Ramadhani. 2026, SKRIPSI. Judul ” Peran Struktur Kepemilikan Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025”

Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

Kata Kunci : Tax Avoidance, Struktur Kepemilikan, Koneksi Politik, Effective Tax Rate, (ETR) Random Effect Modal (REM)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan purposive sampling dan menghasilkan 280 observasi. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*, sedangkan kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham, serta koneksi politik menggunakan variabel dummy. Pengujian dilakukan menggunakan program EViews 12 dengan analisis regresi data panel dan model pengujian terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, kepemilikan direksi, kepemilikan keluarga, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

ABSTRACT

Dianya Mutiara Ramadhani. 2026, THESIS. Title " The Role of Ownership Structure and Political Connections on Tax Avoidance in Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2018–2025 "

Supervisor : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

Keywords : Tax Avoidance, Ownership, Connections Politic, Effective Tax Rate, (ETR) Random Effect Modal (REM)

This study aims to analyze the influence of government ownership, director ownership, institutional ownership, managerial ownership, foreign ownership, family ownership, and political connections on tax avoidance in manufacturing companies in the consumer goods industry listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018–2025. The research method used is quantitative with a purposive sampling approach, yielding 280 observations. Tax avoidance was measured using the Effective Tax Rate (ETR) proxy, while government ownership, director ownership, institutional ownership, managerial ownership, foreign ownership, and family ownership were measured based on the percentage of shareholding, and political connections were measured using a dummy variable. The analysis was conducted using EViews 12 with panel data regression, and the selected model was the Random Effects Model (REM).

The results indicate that government ownership, institutional ownership, managerial ownership, and foreign ownership have a significant effect on tax avoidance. Meanwhile, board ownership, family ownership, and political connections do not affect tax avoidance. This study indicates that ownership structure plays a crucial role in enhancing corporate oversight and compliance with tax obligations, thereby curbing tax avoidance practices among manufacturing firms in the consumer goods sector listed on the Indonesia Stock Exchange.

خلاصة

ديانبا مونييرا راماداني. 2026، أطروحة. العنوان: «دور هيكل الملكية والصلاات السياسية في التهرب الضريبي لدى شركات التصنيع في قطاع السلع الاستهلاكية المسجلة في بورصة إندونيسيا خلال الفترة 2018-2025 المشرفة: نوفي لابليل وافيروه، ماجستير
تأثير (ETR) الكلمات المفتاحية: التهرب الضريبي، هيكل الملكية، العلاقات السياسية، معدل الضريبة الفعلي (REM) العشوائي لرأس المال

هدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير ملكية الحكومة، و ملكية أعضاء مجلس الإدارة، و ملكية المؤسسات، و ملكية الإدارة، و ملكية الأجانب، و ملكية العائلات، والصلاات السياسية على التهرب الضريبي في شركات التصنيع في قطاع للفترة 2018-2025. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة (BEI) السلع الاستهلاكية المسجلة في بورصة إندونيسيا كمية مع نهج العينة الموجهة وأسفرت عن 280 ملاحظة. تم قياس التهرب الضريبي باستخدام مؤشر معدل الضريبة بينما تم قياس ملكية الحكومة، و ملكية مجلس الإدارة، و ملكية المؤسسات، و ملكية الإدارة، و ملكية (ETR) الفعلي الأجانب، و ملكية العائلات بناءً على النسبة المئوية لملكية الأسهم، كما تم قياس الروابط السياسية باستخدام متغيرات مع تحليل انحدار البيانات اللوحية، وكان نموذج الاختبار 12 EViews وهمية. أجري الاختبار باستخدام برنامج (REM) المختار هو نموذج التأثير العشوائي أظهرت نتائج البحث أن ملكية الحكومة، و الملكية المؤسسية، و الملكية الإدارية، و الملكية الأجنبية تؤثر بشكل كبير على التهرب الضريبي. في حين أن ملكية مجلس الإدارة، و ملكية العائلة، والصلاات السياسية لا تؤثر على التهرب الضريبي. تظهر هذه الدراسة أن هيكل الملكية يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الرقابة وامتثال الشركات للالتزامات الضريبية، مما يحد من ممارسات التهرب الضريبي في شركات التصنيع في قطاع السلع الاستهلاكية المسجلة في بورصة إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 80%, sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas pemerintah (Regina et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, upaya peningkatan penerimaan pajak seringkali menghadapi hambatan, salah satunya adalah praktik *tax avoidance*. Fenomena ini menciptakan dilema besar karena perusahaan berusaha mempertahankan laba maksimal bagi pemegang saham melalui skema efisiensi beban pajak yang agresif. Pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap pola transaksi korporasi agar potensi kerugian negara akibat pengalihan laba dapat diminimalisasi secara efektif. Kompleksitas regulasi sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh manajemen untuk merancang strategi perpajakan yang tetap berada dalam koridor hukum namun merugikan kas negara.

Tax avoidance merupakan upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Hanlon & Heitzman, 2010). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini dapat mengurangi potensi penerimaan negara serta berdampak terhadap stabilitas fiskal. Selain itu, *tax avoidance* juga dapat menimbulkan permasalahan etika dan reputasi perusahaan karena dianggap tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap negara (Dyrenge et al., 2008).

Tax avoidance masih menjadi isu penting dalam bidang perpajakan karena perusahaan cenderung berupaya meminimalkan beban pajak yang dapat mengurangi laba perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Andriani (2024) menunjukkan bahwa *tax avoidance* masih menjadi topik yang banyak dikaji dalam penelitian akuntansi dan perpajakan. Wijayanti & Wafiroh (2025) juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* tetap menjadi isu yang relevan dalam penelitian perpajakan karena berkaitan dengan berbagai karakteristik perusahaan yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak.

Fenomena *tax avoidance* menjadi isu global yang mendapat perhatian serius dari regulator dan pembuat kebijakan. Banyak perusahaan multinasional memanfaatkan kompleksitas sistem perpajakan untuk menekan beban pajak melalui strategi seperti *transfer pricing* dan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (Hassan, et al., 2022). Di negara berkembang, praktik ini bahkan lebih sulit dikendalikan karena keterbatasan pengawasan dan regulasi. Secara global, *tax avoidance* tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan risiko reputasi, biaya audit, dan konflik keagenan dalam perusahaan. Tekanan untuk mencapai target laba bersih sering kali mendorong eksekutif untuk mengambil risiko hukum yang dapat mengancam keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang (Octaviantry & Damayanti, 2023). Oleh karena itu, penguatan tata kelola melalui struktur kepemilikan menjadi instrumen esensial untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajemen yang merugikan kepentingan publik.

Di Indonesia, fenomena *tax avoidance* masih menjadi permasalahan yang signifikan. Rendahnya rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 9–12% menunjukkan bahwa kemampuan negara dalam mengumpulkan pajak masih relatif rendah dibandingkan negara lain (Ngelo et al., 2022). Selain itu, laporan internasional menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian miliaran dolar setiap tahun akibat praktik penghindaran pajak. Berbagai kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan besar, seperti praktik *transfer pricing* dan manipulasi laporan keuangan, semakin memperkuat adanya fenomena *tax avoidance* di Indonesia (Suwiknyo, 2019).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia sering kali melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh jajaran manajemen puncak yang memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok. Praktik ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa eksekutif sering kali menggunakan insentif pajak sebagai alat untuk meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek, meskipun tindakan tersebut berisiko merusak reputasi perusahaan (Putri et al., 2024). Ketimpangan antara kebijakan manajemen dan kepatuhan fiskal ini mencerminkan bahwa *tax avoidance* bukan sekadar strategi pajak, melainkan manifestasi dari kegagalan tata kelola di tingkat direksi. Investigasi otoritas pajak terhadap berbagai skema *transfer pricing* pada sektor manufaktur semakin

mempertegas bahwa direktur memegang peranan kunci dalam mengeksekusi strategi pajak yang agresif secara sistematis

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan praktik *tax avoidance* adalah teori agensi (*agency theory*). Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), di mana manajer cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri yang belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilik (Susilowati, 2011). Dalam konteks perpajakan, manajer dapat memanfaatkan strategi *tax avoidance* untuk meningkatkan laba dan insentif pribadi, namun di sisi lain dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan. Selain itu, teori *stakeholder* juga menjelaskan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah sebagai penerima pajak, sehingga praktik *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh tekanan dari berbagai *stakeholder* (Kovermann & Wendt, 2019). Praktik *tax avoidance* tidak terlepas dari keputusan manajemen perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah struktur kepemilikan (*ownership structure*). Struktur kepemilikan mencerminkan distribusi kepemilikan saham dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen serta pengambilan keputusan strategis termasuk kebijakan perpajakan (Chen, 2001). Perbedaan jenis kepemilikan akan menghasilkan perbedaan kepentingan dan kontrol yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Kehadiran berbagai pihak dalam struktur modal perusahaan menuntut adanya keselarasan visi agar strategi perpajakan tidak berbenturan dengan nilai-nilai tata kelola yang baik (Widayat & Kawedar, 2024). Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik saham menjadi instrumen krusial dalam memitigasi tindakan oportunistik manajemen yang berpotensi merugikan arus kas negara. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai komposisi pemegang saham diperlukan untuk memprediksi arah kebijakan beban pajak perusahaan secara lebih akurat.

Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasari oleh karakteristik operasionalnya yang kompleks, di mana perusahaan dalam sektor ini memiliki aset tetap yang besar serta transaksi inventori yang intensif sehingga peluang untuk melakukan manajemen pajak melalui skema depresiasi dan biaya

biaya produksi menjadi lebih terbuka. Sektor industri barang konsumsi dipilih karena memiliki tingkat aktivitas produksi dan distribusi yang tinggi serta produk yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, sehingga sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Perusahaan pada sektor ini juga memiliki struktur biaya yang kompleks, seperti biaya produksi, distribusi, dan persediaan, yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak karena produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Selain itu, industri makanan dan minuman yang merupakan bagian dari sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 6,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2024 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Tingginya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan perusahaan pada sektor industri barang konsumsi menjadi penting karena berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan negara. Variasi struktur kepemilikan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, mulai dari entitas milik negara hingga perusahaan keluarga yang terkoneksi secara politik, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana tarik-menarik kepentingan terjadi dalam menentukan strategi efisiensi pajak (Arifin et al., 2023). Dinamika operasional yang terdampak oleh fluktuasi ekonomi selama periode 2018–2025 semakin memperkuat urgensi penelitian ini untuk melihat sejauh mana perusahaan manufaktur bertahan melalui strategi *tax avoidance* di tengah tekanan fiskal. Fokus pada sektor tunggal ini bertujuan untuk menghindari bias industri dan memastikan bahwa model regresi yang digunakan dapat menangkap karakteristik perilaku perpajakan yang homogen namun dipengaruhi oleh struktur kepemilikan yang heterogen.

Salah satu bentuk kepemilikan adalah kepemilikan pemerintah, yaitu kepemilikan saham oleh pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi karena adanya pengawasan langsung dari pemerintah serta tanggung jawab terhadap publik (Hassan et al., 2022). Selain itu, kepemilikan direksi merupakan kepemilikan saham oleh dewan direksi atau komisaris dalam perusahaan yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Kepemilikan ini dapat meningkatkan keterlibatan dewan dalam menentukan arah

perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* (Hassan et al., 2022). Selanjutnya, kepemilikan manajerial mencerminkan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham sehingga dapat mengurangi konflik keagenan yang dikemukakan oleh (Meckling & Jensen, 1976). Kepemilikan Institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mendorong atau menekan praktik *tax avoidance* tergantung pada kepentingan investor (Khurana & Moser, 2010). Kepemilikan asing memungkinkan perusahaan mengakses strategi perpajakan internasional yang lebih kompleks sehingga berpotensi meningkatkan *tax avoidance* (Christensen & Murphy, 2004). Sementara itu, kepemilikan keluarga sering dikaitkan dengan kontrol yang kuat dan kecenderungan memaksimalkan keuntungan kelompok keluarga sehingga dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* (Maharani & Juliarto, 2019). Selain faktor internal tersebut, faktor eksternal seperti koneksi politik juga memiliki peran penting. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung mendapatkan perlindungan atau kemudahan dalam kebijakan sehingga berpotensi lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* (Apriliani & Wulandari, 2023). Kedekatan dengan pengambil kebijakan sering kali memberikan rasa aman bagi manajemen untuk mengeksploitasi celah hukum tanpa khawatir akan sanksi yang berat. Hal ini terjadi karena entitas yang terkoneksi secara politik cenderung memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi dalam menghadapi audit atau pemeriksaan pajak yang ketat (Firmansyah et al., 2022). Keberadaan tokoh politik dalam struktur organisasi dapat menjadi variabel penentu yang membedakan pola kepatuhan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya di pasar modal.

Struktur kepemilikan yang beragam di Indonesia menjadi faktor penentu utama dalam mengendalikan atau justru mendorong agresivitas pajak perusahaan manufaktur. Kepemilikan pemerintah dan institusional diharapkan mampu meningkatkan pengawasan karena investor tersebut memiliki kapasitas informasi yang lebih luas, sehingga kecenderungan manajer untuk bertindak impulsif dalam menghindari pajak dapat ditekan secara signifikan (Arifin et al., 2023). Namun, kepemilikan keluarga dan manajerial sering kali memicu konflik kepentingan karena pemilik tersebut cenderung menyelaraskan strategi perpajakan dengan dividen yang ingin mereka terima (Slimane et al., 2025). Masuknya kepemilikan

asing serta eksistensi koneksi politik dalam dewan komisaris turut memberikan akses pada proteksi regulasi dan skema pajak internasional yang sangat kompleks, yang pada akhirnya mempermudah perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* tanpa terdeteksi oleh otoritas (Firmansyah et al., 2022; Yusuf et al., 2025). Oleh karena itu, integrasi seluruh variabel kepemilikan ini sangat krusial untuk membedah bagaimana distribusi kontrol di dalam perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memengaruhi pola kepatuhan pajak di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam (*inconsistent*). Lim & Suparman, (2022) menemukan bahwa kepemilikan manajerial, institusional, asing, dan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Fuadi et al., (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, asing, dan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Arifin et al., (2023) menemukan bahwa kepemilikan keluarga meningkatkan *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan manajerial justru menurunkan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian Anggreini & Kusuma, (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif, sedangkan kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya *research gap*, yaitu belum adanya konsistensi hasil terkait pengaruh berbagai jenis kepemilikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya meneliti sebagian variabel kepemilikan dan belum mengintegrasikan struktur kepemilikan dan koneksi politik secara simultan dalam satu model penelitian, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia dengan periode terbaru. Penambahan variabel kepemilikan direksi menjadi sangat relevan mengingat dewan ini memiliki otoritas penuh dalam merumuskan strategi perpajakan yang berdampak langsung pada nilai perusahaan. Selain itu, cakupan periode 2018–2025 memberikan keunggulan data yang lebih aktual untuk menangkap respon korporasi terhadap dinamika regulasi pasca-pandemi di Indonesia. Pengujian menyeluruh terhadap tujuh dimensi kepemilikan dan koneksi politik ini diharapkan mampu menutup celah literatur serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif bagi para regulator.

Berdasarkan fenomena, teori, dan *research gap* tersebut, penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan deskripsi latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Pemerintah Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025?
2. Apakah Kepemilikan Direksi Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025?
3. Apakah Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025?
5. Apakah Kepemilikan Asing Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025?
6. Apakah Kepemilikan Keluarga Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025?
7. Apakah Koneksi Politik Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut::

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Direksi terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2025.
5. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2025.
6. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025
7. Untuk Mengetahui Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, Kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing,

kepemilikan keluarga dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2025

- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji peran kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan
- c. manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018–2025.
- d. manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018–2025.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa: Memberikan pemahaman mengenai pengaruh struktur kepemilikan perusahaan yang meliputi kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, serta kepemilikan keluarga dan koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berperan dalam pengambilan keputusan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan wawasan akademik khususnya di bidang akuntansi, perpajakan, dan keuangan serta menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja.
- b. Bagi Perguruan Tinggi: Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum khususnya pada bidang akuntansi, perpajakan, dan tata kelola perusahaan dengan mengintegrasikan isu-isu terkini seperti *tax avoidance* dan struktur kepemilikan. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2025, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, kritis, dan memiliki pemahaman yang kuat terhadap praktik bisnis dan regulasi perpajakan di Indonesia.
- c. Bagi peneliti selanjutnya: Dapat menjadi referensi dan bahan literatur dalam

- d. pengembangan penelitian selanjutnya terkait *tax avoidance*, khususnya yang berkaitan dengan struktur kepemilikan dan koneksi politik pada
- e. perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperluas variabel, metode penelitian, maupun objek

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengkaji dan mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan, dengan mengintegrasikan variabel dependen yang seperti *tax avoidance* (Y), Variabel independen adalah kepemilikan pemerintah (X1), kepemilikan direksi (X2), kepemilikan institusional (X3), kepemilikan manajerial (X4), kepemilikan asing (X5), kepemilikan keluarga (X6), dan koneksi politik (X7). Tabel berikut menggambarkan hasil penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Sudirman & Marsudi (2025) <i>Ownership structure on tax avoidance with independent commissioner as moderation</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Institutional Ownership</i> - <i>Family Ownership</i> - <i>Managerial Ownership</i>	Regresi Linear Berganda Dan MRA	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . - Sementara itu, kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

		Variabel Moderasi: - <i>Proportion of Independent Commissioner</i>		terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Yusuf et al (2025) <i>Political Connections and Tax Avoidance: The Role of Politically Affiliated Ownership in Corporate Tax Strategies</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Political Connection</i> - <i>Politically Affiliated Ownership</i> Variabel Moderasi: - <i>Profitability</i> Variabel Kontrol: - <i>Firm Size</i> - <i>Leverage</i> - <i>Profitability</i>	- Analisis Regresi data panel dan MRA	- Penelitian ini membuktikan bahwa koneksi politik dan kepemilikan yang berafiliasi politik meningkatkan praktik <i>tax avoidance</i> pada BUMN di Indonesia. Perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki ETR lebih rendah dan BTD lebih tinggi. Namun, profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.

3	Larasati et al (2024) Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Sektor Keuangan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: - Tax Avoidance Variabel Independen: - Komisaris independen - Komite audit - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - Kepemilikan asing - Kualitas audit	- Regresi Linear Berganda	- Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme corporate governance tidak semuanya efektif dalam menekan tax avoidance. - Komite audit dan kualitas audit terbukti mampu menekan praktik tersebut, sementara kepemilikan institusional justru meningkatkan tax avoidance. - Variabel lain seperti komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan asing tidak berpengaruh.
4	Sulfia & Rusmanto (2024) <i>The Role of Corporate Governance in Mitigating Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - Managerial ownership	- Analisis melalui regresi data panel	- Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan (terutama managerial dan foreign ownership) meningkatkan tax avoidance, sedangkan keberadaan komisaris independen mampu menekan tax

		- Institutional ownership - Foreign ownership - Board gender diversity - Independent commissioners Variabel Kontrol: - Board size - Leverage - Solvency - Firm size		avoidance. Variabel tata kelola lain seperti gender diversity dan institutional
5	Anggreini & Kusuma (2024) <i>The Influence of Ownership Structure and Political Connections on Tax Avoidance in Indonesia</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - Government Ownership - Institutional Ownership - Family Ownership - Foreign Ownership	- Analisis regresi data panel	- Government ownership berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. - Institutional ownership berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. - Family ownership berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. - Foreign ownership berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tax avoidance. - Political connections berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance.

	Putri et al (2024) <i>Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Foreign Ownership</i> - <i>Executive Incentives</i> - <i>Transfer Pricing</i>	- Analisis regresi data panel	- <i>Foreign ownership</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Executive incentives</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
7	Fuadi et al (2024) Apakah Struktur Kepemilikan Mempengaruhi Penghindaran Pajak? Bukti Empiris dari Pasar Modal Indonesia	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - Kepemilikan asing - Kepemilikan keluarga - Kepemilikan pemerintah Variabel Kontrol:	- Analisis Regresi data panel	- Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan manajerial dan asing cenderung menekan praktik <i>tax avoidance</i>, sedangkan - kepemilikan keluarga justru meningkatkan praktik tersebut. - Kepemilikan institusional dan pemerintah tidak berpengaruh signifikan.

		- Profitabilitas - <i>Leverage</i> - <i>Firm Size</i>		
8	<i>Does Ownership Structure Affect Tax Avoidance?</i>	Variabel Dependen: - Tax Avoidance Variabel Independen: - <i>Family ownership</i> - <i>Institutional ownership</i> - <i>Managerial ownership</i> - <i>Government ownership</i>	- Analisis regresi data panel	Penelitian ini menunjukkan bahwa Arifin et al (2023) - hanya kepemilikan keluarga yang mampu menekan praktik <i>tax avoidance</i>, sedangkan kepemilikan institusional, manajerial, dan pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol keluarga lebih efektif dalam mengurangi perilaku oportunistik dibandingkan struktur kepemilikan lainnya.

		Variabel Kontrol: - Profitability - Leverage - Firm size - Capital intensity		
9	Regina et al (2023) <i>Tax Avoidance In Review By Institutional Ownership, Firm Size, And Leverage With Profitability As A Moderation</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Institutional ownership</i> - <i>firm size</i> - <i>Leverage</i>	Model Regresi Linear Berganda	- <i>Institutional ownership</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ; <i>firm size</i> tidak berpengaruh. <i>Profitability</i> memperkuat pengaruh.

10	Oktaviani et al (2023) <i>The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector</i>	Variabel Dependen: - Tax Avoidance Variabel Independen: - Institutional ownership - Independent commissioner - Audit committee - Audit quality - Fiscal loss compensation	Analisis regresi data panel	- <i>Institutional ownership</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Independent commissioner</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Audit committee</i> memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Audit quality</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Fiscal loss compensation</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
11	Lim & Suparman (2022) <i>The Impact of Ownership Structure and Board Characteristics on Tax Avoidance</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - Kepemilikan manajerial - Kepemilikan institusional - Kepemilikan Asing - Kepemilikan Keluarga - Ukuran dewan direksi - Direksi independen - Frekuensi rapat direksi - Keragaman gender	Analisis regresi data panel	- Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.

		Variabel Kontrol: - Ukuran perusahaan - Profitabilitas - Perusahaan audit - Umur perusahaan		- Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. Direksi independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Frekuensi rapat direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Keragaman gender tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
12	Akbar et al (2022) <i>Political Connection, Foreign Ownership, and Tax Avoidance: Does Executive Gender Moderate the Relationship?</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Political connection</i> - <i>Foreign ownership</i> Variabel Kontrol: - <i>Tax administration constraint</i> - <i>Tax rate</i> - <i>Gratuity</i>	- Analisis Regresi - Logistik Multinomial	- <i>Political connection</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Foreign ownership</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Executive gender</i> mampu memperkuat pengaruh <i>political connection</i> terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Executive gender</i> tidak mampu memoderasi pengaruh <i>foreign</i>

13	Firmansyah et al (2022) <i>Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role?</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Political connections</i> - <i>Investment opportunity set</i> Variabel Moderasi: - <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Variabel Kontrol: - <i>Firm size</i> - <i>Leverage</i> - <i>Profitability</i>	- Analisis Regresi Data Panel dan MRA	- <i>Political connections</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Investment opportunity set</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Corporate social responsibility disclosure</i> mampu memperlemah pengaruh <i>political connections</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
	Hassan et al (2022) <i>Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the Listed Companies of Bangladesh</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Institutional Ownership</i> - <i>Board Ownership (Director Ownership)</i> - <i>Foreign Ownership</i> - <i>Public Ownership</i>	- Regresi data panel	- <i>Board ownership</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Board ownership</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Public ownership</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh signifikan

				- <i>Foreign ownership</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
15	Melyaningrum et al (2022) <i>Could Size Moderate Managerial Ownership, , and Audit Quality of Tax Avoidance Occurs in Southeast Asia's Banking?</i>	Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: - <i>Managerial Ownership</i> - <i>Institutional Ownership</i> - <i>Audit Quality</i> Variabel Moderasi: - <i>Firm Size</i>	- Analisis Regresi data panel dan MRA	- kepemilikan institusional yang mampu menekan praktik <i>tax avoidance</i> pada perbankan Asia Tenggara. - kepemilikan manajerial dan kualitas audit tidak berpengaruh. Ukuran perusahaan berperan sebagai variabel moderasi yang justru melemahkan

Berdasarkan Tabel 2.1, Penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hassan et al., (2022) memberikan perspektif berbeda melalui studinya di pasar modal Bangladesh dengan menyoroti peran kepemilikan dewan direksi secara spesifik. Hasil empiris penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan direksi (*board ownership*) berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan *tax avoidance* di perusahaan. Besarnya kepemilikan saham oleh jajaran direksi cenderung menyelaraskan kepentingan mereka dengan pemegang saham untuk meminimalkan beban kas yang keluar melalui setoran pajak. Meskipun begitu, penelitian ini mencatat bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak memiliki peran yang relevan dalam mempengaruhi keputusan perpajakan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa struktur kepemilikan di setiap negara memiliki karakteristik yang unik dan dipengaruhi oleh lingkungan regulasi serta sistem hukum

Sudirman & Marsudi (2025) melakukan pengujian pada perusahaan pertambangan dan menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa investor institusi sering kali mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak demi meningkatkan pengembalian investasi bagi pemegang saham. Meskipun demikian, variabel kepemilikan keluarga dan manajerial dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap kebijakan pajak perusahaan. Selain itu, penggunaan komisaris independen sebagai variabel moderasi terbukti tidak mampu mengubah hubungan antara struktur kepemilikan dengan kecenderungan *tax avoidance*.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Arifin et al., (2023) memberikan bukti empiris mengenai peran strategis koneksi politik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hasil penelitian tersebut membuktikan secara konsisten bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi politik cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya. Fenomena ini tercermin dari nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang lebih rendah, yang menandakan adanya pemanfaatan relasi politik untuk memperoleh kemudahan fiskal. Peneliti juga menegaskan bahwa kepemilikan pemerintah tidak serta-merta menjamin kepatuhan pajak yang tinggi karena adanya tekanan target profitabilitas yang harus dicapai oleh manajemen. Namun, variabel profitabilitas itu sendiri ditemukan tidak mampu memoderasi hubungan antara koneksi politik dengan strategi perpajakan korporasi secara signifikan.

Selanjutnya, penelitian Anggreini & Kusuma (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, serta koneksi politik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* masih beragam.

Penelitian oleh Sulfia & Rusmanto, (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial dan asing dapat mendorong praktik penghindaran pajak, namun kepemilikan institusional tidak selalu mampu menekan praktik tersebut. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Sudirman & Marsudi, (2025) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepemilikan institusional dalam praktik *tax avoidance* masih belum konsisten.

Selain itu, penelitian Fuadi et al., (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing cenderung menekan praktik *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan keluarga justru meningkatkan praktik *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional serta kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* dapat berbeda tergantung pada karakteristik perusahaan. melakukan penelitian mengenai peran tata kelola perusahaan dalam memitigasi praktik penghindaran pajak pada berbagai sektor di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing secara signifikan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa manajer yang memiliki saham cenderung mencari celah pajak untuk meningkatkan kekayaan pribadi, sementara investor asing memanfaatkan struktur internasional untuk efisiensi fiskal. Namun, kehadiran komisaris independen dalam struktur pengawasan terbukti efektif dalam menekan tindakan pajak yang agresif tersebut. Meskipun demikian, variabel tata kelola lainnya seperti diversitas gender dewan dan kepemilikan institusional ditemukan tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kebijakan pajak perusahaan.

Putri et al., (2024) melakukan studi mendalam pada sektor perbankan di Indonesia untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, insentif eksekutif, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Temuan penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan asing memiliki korelasi positif yang sangat kuat terhadap peningkatan praktik penghindaran pajak di industri perbankan. Di sisi lain, pemberian insentif kepada eksekutif justru ditemukan memiliki pengaruh negatif, yang berarti kompensasi yang tepat dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepatuhan regulasi. Menariknya, praktik *transfer pricing* dalam penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat beban pajak yang dibayarkan oleh bank. Para peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap kepemilikan asing menjadi faktor kunci bagi regulator untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak dari sektor keuangan.

Octaviantary & Damayanti, (2023) meneliti fenomena *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur dengan mempertimbangkan peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan tingkat *leverage* perusahaan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tindakan penghindaran pajak. Penggunaan utang yang tinggi memberikan insentif berupa beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan total setoran pajak. Profitabilitas ditemukan berperan sebagai variabel yang memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan pajak tersebut secara nyata. Akan tetapi, ukuran perusahaan yang besar dalam penelitian ini tidak menjamin adanya peningkatan atau penurunan pada praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen.

Oktaviani et al., (2023) memfokuskan penelitian pada sektor perbankan dengan menguji pengaruh tata kelola dan kompensasi rugi fiskal terhadap kebijakan pajak. Temuan empiris membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh negatif yang sangat signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang independen di sektor perbankan berjalan dengan baik dalam memastikan

kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki peran penting dalam mengontrol tindakan perpajakan perusahaan. Sebaliknya, fasilitas kompensasi rugi fiskal justru memberikan peluang bagi bank untuk melakukan penghindaran pajak secara legal dalam jumlah yang lebih besar.

Lim & Suparman (2022) menganalisis dampak struktur kepemilikan dan karakteristik dewan terhadap kebijakan pajak pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan terkonsentrasi dan keberadaan direksi independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Fokus kekuasaan pada segelintir pemilik saham cenderung mendorong kebijakan efisiensi pajak yang agresif demi kepentingan pemegang saham pengendali. Meskipun demikian, variabel kepemilikan lainnya seperti manajerial, institusional, asing, dan keluarga tidak ditemukan memiliki pengaruh yang berarti. Selain itu, ukuran dewan direksi justru menunjukkan pengaruh negatif, yang menandakan bahwa dewan yang lebih besar mampu melakukan kontrol kolektif untuk mengurangi risiko pajak.

2.2. Kajian Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori Keagenan merupakan teori yang dikemukakan oleh Meckling & Jensen (1976). Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Hubungan keagenan adalah keterikatan antara pemilik (pemegang saham) suatu perusahaan dan manajemen perusahaan dalam memikul tanggung jawab atas wewenang demi kepentingan pemilik. Dalam konteks perpajakan, teori keagenan dapat menjelaskan keputusan manajer terkait perencanaan pajak. Pemilik, khususnya pemegang saham yang cenderung menghindari risiko, memiliki ekspektasi tinggi terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini dapat memberikan tekanan kepada manajer untuk meningkatkan laba setelah pajak. Sebagai

respons, manajer dapat menggunakan strategi *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko, baik dari sisi hukum maupun reputasi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti struktur kepemilikan, untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan *tax avoidance* (Fuadi et al., 2024)

Hubungan agensi dalam struktur kepemilikan yang beragam menciptakan dinamika pengawasan yang berbeda terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Kepemilikan manajerial membuat manajer memposisikan diri sebagai agen sekaligus prinsip sehingga menekan keinginan oportunistik jangka pendek termasuk praktik penghindaran pajak (Arifin et al., 2023).

Kepemilikan direksi membuat dewan direksi memposisikan diri sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan sehingga setiap keputusan yang diambil, termasuk kebijakan perpajakan, akan lebih mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai perusahaan dan investasi yang dimiliki

Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pemantau profesional yang memiliki keluasan pengetahuan dan akses informasi untuk mencegah tindakan impulsif manajemen dalam meminimalkan beban fiskal. Struktur kepemilikan asing sering kali memanfaatkan celah pajak internasional untuk efisiensi, namun kehadiran pengawasan eksternal yang ketat dapat memitigasi agresivitas tersebut (Putri et al., 2024). Kepemilikan keluarga terkadang memicu konflik agensi karena pemegang saham pengendali cenderung mendorong kebijakan pajak yang menguntungkan kelompok keluarga di atas kepentingan pemegang saham minoritas (Fuadi et al., 2024). Entitas negara melalui kepemilikan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara target profitabilitas dan kepatuhan hukum sebagai teladan bagi wajib pajak lainnya.

Koneksi politik menjadi variabel krusial dalam teori agensi karena relasi tersebut sering kali memberikan perlindungan khusus bagi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif. Perusahaan yang terafiliasi secara politik cenderung memiliki kepercayaan diri lebih tinggi untuk memanfaatkan celah hukum karena hubungan tersebut dianggap mampu mengurangi

probabilitas pemeriksaan oleh otoritas pajak (Arifin et al., 2023). Fenomena ini mencerminkan adanya biaya agensi dalam bentuk eksploitasi jabatan yang dilakukan oleh manajemen demi kepentingan kelompok atau afiliasi politik tertentu (Firmansyah et al., 2022). Pemilik perusahaan mungkin melihat koneksi politik sebagai aset strategis untuk menurunkan beban fiskal secara signifikan melalui akses informasi regulasi yang lebih awal. Risiko inefisiensi jangka panjang tetap mengintai jika pengawasan internal melemah akibat ketergantungan pada perlindungan politik yang bersifat sementara. Penguatan tata kelola tetap menjadi solusi utama agar koneksi politik tidak menjadi instrumen bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang merusak keberlanjutan perusahaan.

2.2.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* (*stakeholder theory*) menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pemerintah, masyarakat oleh aktivitas perusahaan (Freeman, 1984). Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap pencapaian tujuan organisasi serta dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan.

Dalam perkembangannya, teori *stakeholder* dalam manajemen strategis digunakan untuk mengkategorikan interaksi perusahaan dengan berbagai pemangku kepentingan. Teori ini dapat dibagi menjadi tiga pendekatan, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Pendekatan deskriptif menjelaskan hubungan antara pemangku kepentingan dengan aktivitas atau peristiwa dalam perusahaan. Pendekatan instrumental berfokus pada bagaimana manajemen mencapai tujuan organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. Sementara itu, pendekatan normatif menekankan aspek etika dan tanggung jawab manajemen dalam menjalankan tata kelola perusahaan (Miller, 2022). Dalam konteks perpajakan, teori *stakeholder*

menjelaskan bahwa pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan yang memperhatikan kepentingan *stakeholder* cenderung menghindari praktik *tax avoidance* yang agresif, karena dapat merugikan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Teori *stakeholder* memberikan kerangka kerja yang lebih luas dalam memandang pengaruh kepemilikan dan koneksi politik terhadap kontribusi sosial perusahaan melalui pembayaran pajak. Pemerintah sebagai *stakeholder* utama sangat berkepentingan terhadap optimalisasi penerimaan pajak, sehingga perusahaan dengan kepemilikan pemerintah seharusnya menekan intensitas *tax avoidance* demi kepentingan publik (Anggreini & Kusuma, 2024). Struktur kepemilikan asing dan keluarga wajib mempertimbangkan reputasi perusahaan di mata masyarakat luas karena praktik penghindaran pajak yang agresif dapat memicu kecaman publik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik memikul beban moral yang lebih besar untuk menunjukkan integritas sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada para konstituen. Penerapan strategi pajak yang transparan mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjamin keberlangsungan bisnis (Firmansyah et al., 2022). Manajemen yang mengadopsi perspektif *stakeholder* akan memandang pajak sebagai investasi sosial yang memperkuat lisensi operasional perusahaan di tengah masyarakat.

2.2.3 *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dilakukan melalui berbagai strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Hassan et al., 2022). *Tax avoidance* menjadi salah satu strategi yang umum digunakan oleh perusahaan karena dapat meningkatkan laba setelah pajak dan

kinerja keuangan perusahaan.

Dalam praktiknya, *tax avoidance* mencerminkan tingkat agresivitas perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Perusahaan yang memiliki tingkat *tax avoidance* tinggi cenderung membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan laba yang dihasilkan. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, namun di sisi lain dapat merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak (Fuadi et al., 2024). Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi isu penting yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Manajemen perusahaan sering kali memandang pajak sebagai biaya yang dapat mengurangi ketersediaan aliran kas bagi pemegang saham sehinggamemicu pencarian strategi efisiensi melalui celah hukum. Strategi ini mencerminkan *trade-off* antara peningkatan nilai perusahaan dan risiko deteksi oleh otoritas pajak yang dapat merusak citra organisasi di masa depan (Putri et al., 2024). Perusahaan manufaktur di Indonesia kerap menggunakan instrumen keuangan yang kompleks guna menggeser laba ke wilayah dengan beban pajak rendah tanpa melanggar regulasi formal. Pemerintah melalui otoritas pajak terus memperketat pengawasan karena praktik ini secara kolektif mengancam target penerimaan negara yang menjadi tumpuan pembangunan nasional (Octavianary & Damayanti, 2023). Integrasi tata kelola yang transparan menjadi benteng utama bagi perusahaan untuk memastikan bahwa efisiensi pajak tidak berujung pada pelanggaran etika bisnis yang merugikan publik.

Tax avoidance dapat diukur dengan berbagai proksi yang dikembangkan berdasarkan informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut Hanlon & Heitzman, (2010), beberapa ukuran yang umum digunakan untuk mengukur *tax avoidance* antara lain *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dan *Book-Tax Difference (BTD)*. *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan ukuran yang paling banyak digunakan dalam penelitian karena mencerminkan proporsi beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance*, sedangkan semakin tinggi nilai ETR menunjukkan

semakin rendah praktik *tax avoidance* Dyreng et al., (2008). Selain ETR, terdapat *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yang dihitung berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan secara kas dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Pengukuran lainnya adalah *Book-Tax Difference (BTD)*, yaitu selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Menurut (Hanlon & Heitzman, (2010) BTD dapat digunakan sebagai indikator *tax avoidance*, namun berpotensi menimbulkan kesalahan pengukuran apabila dipengaruhi oleh faktor lain, seperti perbedaan profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini, *Effective Tax Rate (ETR)* dipilih sebagai proksi *tax avoidance* karena merupakan ukuran yang paling umum digunakan dalam penelitian terdahulu, memiliki data yang tersedia secara lengkap dalam laporan keuangan, serta mampu menggambarkan tingkat beban pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Selain itu, ETR dinilai lebih sederhana dan memberikan ukuran yang lebih konsisten dibandingkan CETR maupun BTD dalam mengidentifikasi praktik *tax avoidance*.

2.2.4 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui lembaga negara. Kepemilikan ini menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan, sehingga perusahaan cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat (Anggreini & Kusuma, 2024). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah biasanya memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regulasi, termasuk dalam hal perpajakan.

Dalam konteks *tax avoidance*, kepemilikan pemerintah dapat berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena pemerintah memiliki kepentingan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, sehingga perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung lebih

berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, semakin besar proporsi kepemilikan pemerintah, maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah (Arifin et al., 2023).

Entitas negara yang menanamkan saham pada perusahaan publik membawa mandat ganda untuk menghasilkan laba sekaligus menjaga kedaulatan fiskal negara. Kehadiran pemerintah dalam struktur kepemilikan menciptakan mekanisme pemantauan yang melekat sehingga manajer merasa enggan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Anggreini & Kusuma, 2024). Perusahaan dengan proporsi saham negara yang signifikan biasanya mengadopsi standar kepatuhan yang lebih tinggi demi menjaga reputasi instansi pemerintah di mata masyarakat. Namun, keterlibatan politik dalam manajemen terkadang menciptakan ambiguitas jika target dividen yang tinggi justru memaksa perusahaan untuk tetap mencari celah penghematan beban. Arifin et al. (2023) berpendapat bahwa efektivitas pengawasan pemerintah sangat bergantung pada kualitas birokrasi dan integritas pejabat yang ditempatkan sebagai perwakilan di dewan komisaris.

2.2.5 Kepemilikan Direksi

Kepemilikan direksi diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak direksi (Hassan et al., 2022). Dewan Direksi, dengan kewenangan pengendalian dan peran penasihatnya, mengambil semua keputusan strategis dalam bisnis untuk memastikan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, Dewan Direksi memastikan keseimbangan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta menjamin akuntabilitas atas semua tindakan manajemen, terutama terkait strategi perencanaan pajak (Hassan et al., 2022)

Secara konsep, semakin besar kepemilikan direksi, maka semakin besar pula pengaruh dewan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, di sisi lain, dewan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga reputasi perusahaan, sehingga dapat membatasi

praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif (Anggreini & Kusuma, 2024)

Anggota dewan yang memiliki saham dalam perusahaan mempunyai motivasi lebih kuat untuk memastikan setiap keputusan strategis memberikan nilai tambah jangka panjang. Keterlibatan direksi sebagai pemilik saham menyelaraskan tujuan pribadi dengan pertumbuhan organisasi sehingga fungsi pengawasan internal berjalan secara lebih optimal (Hassan et al., 2022). Direksi yang kompeten akan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap skema perencanaan pajak agar tidak menimbulkan masalah hukum di masa depan. Meskipun keinginan untuk memperbesar laba tetap ada, tanggung jawab moral direksi sebagai wajah perusahaan membatasi penggunaan taktik pajak yang terlalu berisiko (Anggreini & Kusuma, 2024). Keberhasilan pengendalian *tax avoidance* sangat bergantung pada sejauh mana direksi mampu menjalankan fungsi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap laporan keuangan.

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan bersama oleh berbagai entitas yang diklasifikasikan sebagai lembaga, termasuk yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan korporasi seperti PT (Prasetyo, 2023). Secara konsep, kepemilikan institusional dapat menekan praktik *tax avoidance* melalui peningkatan pengawasan terhadap manajemen (Arifin et al., 2023). Namun, dalam beberapa penelitian, kepemilikan institusional justru mendorong *tax avoidance* karena institusional lebih berorientasi pada keuntungan perusahaan (Anggreini & Kusuma, 2024; Sudirman & Marsudi, 2025). Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam.

Lembaga investasi yang memegang saham dalam jumlah besar memiliki kapabilitas teknis untuk mengevaluasi kewajaran strategi perpajakan yang dijalankan oleh manajemen. Kepemilikan institusional yang kuat sering kali memaksa perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih detail guna

menjamin keamanan investasi jangka panjang (Arifin et al., 2023). Pengawasan dari pihak institusi dapat bertindak sebagai penyeimbang yang mencegah manajer melakukan tindakan eksploitatif demi keuntungan pribadi sesaat.

Namun, tekanan dari investor institusi terhadap target profitabilitas terkadang justru mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara sistematis (Sudirman & Marsudi, 2025). Oleh karena itu, orientasi waktu dari pemegang saham institusi menjadi faktor penentu utama apakah kehadiran institusi tersebut akan menekan atau justru mendukung praktik *tax avoidance*.

2.2.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan oleh manajemen mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh para manajer, yang diukur berdasarkan proporsi saham yang dipegang oleh para manajer sebagaimana tercantum dalam laporan perusahaan. Persentase kepemilikan tersebut dapat ditentukan dengan menganalisis dokumen keuangan (Zalogo et al., 2022). Dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, kepemilikan manajerial dapat memberikan dua pengaruh yang berbeda. Di satu sisi, manajer dapat melakukan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan (Sulfia & Rusmanto, 2024). Namun di sisi lain, manajer juga dapat menghindari praktik tersebut untuk menjaga stabilitas dan reputasi perusahaan (Fuadi et al., 2024). Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* masih bersifat tidak konsisten.

Pemberian saham kepada para manajer bertujuan untuk mengurangi konflik agensi dengan mengubah posisi manajer menjadi bagian dari kelompok pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial mendorong manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan pajak yang agresif karena risiko hukum akan berdampak langsung pada nilai aset pribadi (Arifin et al., 2023). Manajer yang memiliki rasa kepemilikan tinggi cenderung menjaga stabilitas perusahaan daripada mengejar laba semu melalui skema perencanaan pajak yang manipulatif (Fuadi et al., 2024). Akan tetapi, proporsi kepemilikan yang terlalu kecil mungkin tidak cukup efektif untuk mengubah pola pikir manajer

yang masih berorientasi pada bonus kinerja jangka pendek. Keselarasan kepentingan ini memerlukan dukungan sistem remunerasi yang adil agar manajer tetap fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan patuh hukum.

2.2.8. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing sangat penting bagi perusahaan karena kehadiran investor asing berarti perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang baik, sehingga menarik investor lain untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Rahmawati & Lisiantara, 2023). Dalam konteks perpajakan, kepemilikan asing dapat mendorong praktik *tax avoidance* karena perusahaan memiliki akses terhadap strategi perpajakan internasional yang lebih kompleks (Anggreini & Kusuma, 2024). Namun, dalam beberapa kasus, kepemilikan asing juga dapat meningkatkan transparansi dan pengawasan sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance* (Fuadi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* masih belum konsisten.

Investor dari luar negeri sering kali membawa standar tata kelola global yang lebih ketat serta pengetahuan tentang efisiensi operasional yang lebih canggih ke dalam perusahaan lokal. Kehadiran kepemilikan asing dapat meningkatkan pengawasan eksternal sehingga manajemen lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai aturan (Fuadi et al., 2024). Namun, akses terhadap jaringan internasional juga memungkinkan perusahaan untuk menggunakan skema *transfer pricing* yang lebih rumit guna mengalihkan laba ke negara lain (Putri et al., 2024). Perusahaan manufaktur dengan investasi asing yang besar sering kali berada di bawah radar pengawasan otoritas pajak karena potensi pelarian pajak lintas batas negara. Transparansi informasi menjadi kunci utama bagi pemerintah untuk memastikan bahwa investasi asing memberikan kontribusi ekonomi nyata melalui pembayaran pajak yang jujur

2.2.9. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam garis keturunan keluarga, di mana keturunan selanjutnya mewarisi dan secara langsung meneruskan bisnis tersebut. (Tarmizi & Perkasa, 2022) Dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, *family ownership* dapat mendorong praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan keluarga (Anggreini & Kusuma, 2024; Fuadi et al., 2024). Namun, di sisi lain, perusahaan keluarga juga cenderung menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha sehingga dapat menghindari praktik *tax avoidance* yang berisiko (Arifin et al., 2023). Oleh karena itu, pengaruh kepemilikan keluarga terhadap *tax avoidance* masih belum konsisten.

Struktur bisnis keluarga memiliki karakteristik unik di mana keberlangsungan nama baik dan warisan aset menjadi prioritas utama bagi para pemegang saham pengendali. Kepemilikan keluarga yang dominan dapat menekan praktik penghindaran pajak karena keluarga pemilik ingin menghindari skandal yang dapat merusak reputasi sosial di masyarakat (Arifin et al., 2023). Sebaliknya, dorongan untuk mengakumulasi kekayaan keluarga secara turun-temurun terkadang memicu manajer untuk melakukan penghematan pajak melalui transaksi hubungan istimewa (Fuadi et al., 2024). Dinamika ini menunjukkan bahwa kendali keluarga bertindak sebagai pedang bermata dua yang sangat bergantung pada nilai-nilai etika yang dianut oleh kepala keluarga. Pengawasan dari pihak independen tetap diperlukan untuk menjamin bahwa kepentingan keluarga tidak merugikan hak-hak pemegang saham minoritas dan negara.

2.2.10. Koneksi Politik

Koneksi Politik merupakan hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah atau pejabat publik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Hubungan politik sering terjadi di negara-negara berkembang, yang dilakukan dengan menempatkan pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah, sehingga terjalinlah hubungan dengan pemerintah di

dalam hierarki organisasi baik dari kalangan komisaris maupun direksi perusahaan (Apriliani & Wulandari, 2023). Dalam konteks perpajakan, koneksi politik dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* karena adanya perlindungan atau kemudahan dalam regulasi (Hassan et al., 2022). Namun, dalam beberapa penelitian (Anggreini & Kusuma, 2024) koneksi politik tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* masih bersifat tidak konsisten.

Perusahaan yang memiliki kedekatan khusus dengan tokoh politik sering kali menikmati kemudahan akses informasi birokrasi dan perlindungan dari perusahaan yang memiliki kedekatan khusus dengan tokoh politik sering kali menikmati kemudahan akses informasi birokrasi dan perlindungan dari pemeriksaan administratif yang ketat. Koneksi politik memberikan rasa aman bagi manajemen untuk melakukan *tax avoidance* secara lebih berani karena menganggap memiliki dukungan dari lingkaran kekuasaan (Hassan et al., 2022). Perusahaan yang terafiliasi politik di Indonesia terbukti memiliki tingkat pajak efektif yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tanpa koneksi politik (Yusuf et al., 2025). Praktik ini menciptakan ketidakadilan dalam iklim bisnis karena perusahaan tertentu mendapatkan keuntungan kompetitif melalui penghematan pajak yang tidak merata. Pemerintah perlu memperkuat independensi otoritas pajak agar koneksi politik tidak menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang adil terhadap seluruh wajib pajak badan.

2.2.11. Tax Avoidance dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, pajak dipandang sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang berlandaskan nilai-nilai syariah, khususnya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Pajak dapat diberlakukan secara temporer oleh *ulil amri* sebagai kewajiban tambahan setelah zakat, terutama ketika terjadi kekosongan atau kekurangan dana pada *baitul mal*,

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan umat dan mencegah mudarat yang lebih besar. Dalam hal ini, pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (Isroah et al., 2016).

Lebih lanjut, Islam memandang praktik perpajakan sebagai instrumen distribusi kekayaan yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan kejujuran oleh para pelaku bisnis. Allah SWT memberikan peringatan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah ia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, serta hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun darinya...”. Ayat ini menjadi landasan bahwa nilai tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dalam konteks perpajakan, pencatatan yang benar menjadi dasar bagi perusahaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan normatif bahwa perusahaan seharusnya menjalankan kewajiban perpajakan secara jujur dan menghindari praktik penghindaran pajak yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah.

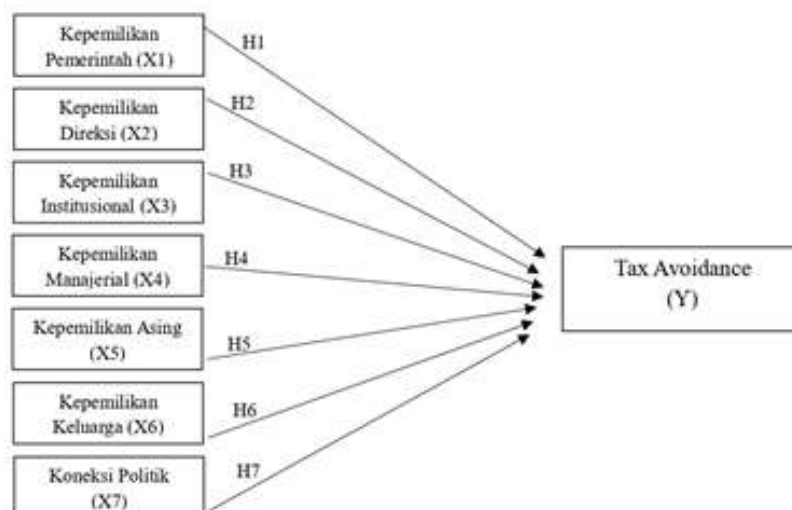
Struktur kepemilikan dan koneksi politik dalam organisasi harus berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai *hisbah* atau pengawasan diri demi mencegah perilaku penyimpangan pajak. Kepemilikan pemerintah dan institusi membawa beban tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa keuntungan perusahaan tidak diperoleh dengan cara mengelabui otoritas fiskal.

Manajer yang berperan sebagai wakil dari pemilik saham wajib mengedepankan sifat *shiddiq* dalam melaporkan laba yang sebenarnya agar tidak terjadi distorsi pada kewajiban pajak. Hubungan dengan pihak penguasa atau koneksi politik tidak boleh menjadi perisai untuk menghindari kontribusi wajib yang telah ditetapkan oleh pemimpin demi kepentingan umum. Strategi perpajakan yang transparan mencerminkan ketakwaan manajemen dalam menjaga integritas korporasi serta menjamin keberkahan setiap harta yang dikelola oleh perusahaan (Firmansyah et al., 2022)

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2025. Maka dari itu, rangka pemikiran dalam penelitian disusun sebagaimana berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti, 2026

Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara Kepemilikan Pemerintah (X1) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y). Kepemilikan Direksi (X2) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y). Kepemilikan Institusional (X3) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y). Kepemilikan Manajerial (X4) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y). Kepemilikan Asing (X5) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y). Kepemilikan Keluarga (X6) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y). Koneksi Politik (X7) berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (Y). Kepemilikan Pemerintah (X1), Kepemilikan Direksi (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Kepemilikan Manajerial (X4), Kepemilikan Asing (X5), Kepemilikan Keluarga (X6), dan Koneksi Politik (X7) berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (Y).

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan pemerintah merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan *stakeholder theory*, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung lebih patuh terhadap regulasi, termasuk dalam kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah sebagai pemegang saham dapat menekan praktik *tax avoidance*. Penelitian Anggreini & Kusuma, (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan pemerintah, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa perusahaan negara tidak terlibat dalam skema yang merugikan penerimaan kas negara. Kehadiran negara dalam struktur permodalan menciptakan tekanan pengawasan yang lebih intensif sehingga manajemen

cenderung menghindari strategi perpajakan yang berisiko tinggi. Perusahaan dengan proporsi saham pemerintah yang signifikan sering kali menjadi sorotan publik sehingga kepatuhan terhadap regulasi menjadi prioritas utama guna menjaga reputasi instansi pemerintah. Arifin et al., (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena berada dalam pengawasan langsung pemerintah. Hassan et al, (2022) juga menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena mempertimbangkan reputasi dan tanggung jawab publik.

Selain itu, Firmansyah et al., (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan dapat menekan praktik tax avoidance karena perusahaan berada dalam pengawasan regulator dan masyarakat. Penelitian Putri et al., (2024) turut menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-pemerintah

H1: Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2. Pengaruh Kepemilikan Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Direksi merupakan kepemilikan saham oleh dewan direksi dan komisaris yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Berdasarkan *agency theory*, kepemilikan oleh dewan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Penelitian Hassan et al., (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan oleh dewan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* guna meningkatkan kinerja perusahaan.

Anggota dewan direksi yang memiliki porsi saham signifikan dalam perusahaan mempunyai kewenangan besar untuk mengarahkan kebijakan perencanaan pajak demi keuntungan pribadi dan pemegang saham. Kepemilikan saham oleh direksi meningkatkan motivasi untuk memaksimalkan laba setelah

pajak karena kenaikan profitabilitas akan berdampak langsung pada nilai investasi yang dimiliki oleh dewan tersebut

Manajemen sering kali memanfaatkan fleksibilitas regulasi untuk merancang strategi penghindaran pajak guna memperbesar arus kas internal yang tersedia bagi operasional bisnis. Putri et al., (2024) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh dewan direksi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Fuadi et al., (2024) juga menemukan bahwa kepemilikan oleh pihak internal perusahaan mendorong manajemen untuk lebih agresif dalam melakukan efisiensi pajak. Selain itu, Sulfia & Rusmanto (2024) menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen dan direksi dapat meningkatkan motivasi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan guna meningkatkan return perusahaan. Penelitian Firmansyah et al., (2022) turut menyatakan bahwa kekuatan internal perusahaan, termasuk direksi yang memiliki kepemilikan saham, dapat mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* perusahaan secara signifikan.

H2: Kepemilikan direksi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi seperti bank, perusahaan investasi, dan asuransi. Dalam *agency theory*, kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme monitoring terhadap manajemen. Namun, dalam beberapa kasus, institusional juga berorientasi pada profit sehingga dapat mendorong praktik *tax avoidance*. Penelitian Sudirman & Marsudi (2025) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Anggreini & Kusuma (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Investor institusional memiliki kemampuan analisis yang mendalam serta akses informasi yang luas untuk mendorong manajemen melakukan penghematan beban melalui skema pajak yang legal namun agresif. Orientasi lembaga investasi

pada tingkat pengembalian modal yang tinggi memaksa manajemen untuk mengeksploitasi setiap celah dalam peraturan perpajakan demi meningkatkan dividen tahunan. Kehadiran institusi besar dalam struktur kepemilikan sering kali menciptakan tuntutan kinerja finansial yang ketat sehingga efisiensi pajak menjadi instrumen utama untuk mencapai target laba bersih. Hassan et al. (2022) menyatakan bahwa investor institusional cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak guna meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian Fuadi et al., (2024) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan karena institusi berorientasi pada peningkatan *return* investasi.

Selain itu, Putri et al., (2024) menemukan bahwa institusi yang memiliki saham dalam jumlah besar cenderung memberikan tekanan kepada manajemen untuk meningkatkan laba setelah pajak melalui strategi *tax avoidance*. Penelitian Sulfia & Rusmanto, (2024) turut menjelaskan bahwa investor institusional memiliki kekuatan monitoring yang besar terhadap manajemen sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perpajakan perusahaan. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan dari pihak institusi lebih condong pada pengamanan kepentingan finansial pemegang saham dibandingkan pemenuhan kewajiban sosial kepada negara. canggih ke dalam perusahaan lokal. Kehadiran kepemilikan asing dapat

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance

2.3.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Namun, dalam praktiknya, manajemen dapat memanfaatkan *tax avoidance* untuk meningkatkan laba perusahaan. Penelitian (Sulfia & Rusmanto, 2024) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan

melakukan *tax avoidance*.

Manajer yang memiliki saham perusahaan cenderung berupaya keras untuk meningkatkan nilai ekuitas dengan cara meminimalkan pengeluaran kas yang dianggap tidak produktif seperti pembayaran pajak. Posisi ganda sebagai pengelola sekaligus pemilik memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi manajer untuk mengimplementasikan taktik *tax avoidance* tanpa khawatir akan teguran dari prinsipal. Kepemilikan manajerial menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi manajemen untuk mengalihkan beban fiskal menjadi cadangan laba yang dapat meningkatkan harga saham di pasar modal. Sulfia & Rusmanto (2024) menjelaskan bahwa manajer pemilik sering kali mengabaikan risiko reputasi jangka panjang demi mendapatkan keuntungan finansial jangka pendek melalui efisiensi pajak. Hassan et al. (2022) menyatakan bahwa manajemen yang memiliki saham perusahaan cenderung mendorong kebijakan perpajakan yang agresif guna meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan. Penelitian Fuadi et al., (2024) juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena manajer berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi melalui efisiensi pajak. Selain itu, Putri et al. (2024) menjelaskan bahwa manajemen yang memiliki kepemilikan saham lebih terdorong untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan melalui pengurangan beban pajak. Penelitian Firmansyah et al., (2022) turut menunjukkan bahwa kekuatan internal manajemen dalam struktur kepemilikan dapat mempengaruhi kebijakan *tax avoidance* perusahaan secara signifikan

H4: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.5. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Asing mencerminkan kepemilikan saham oleh investor asing yang memiliki akses terhadap strategi perpajakan global. Investor asing cenderung mendorong efisiensi pajak melalui praktik *tax avoidance*. Penelitian

Sulfia & Rusmanto, (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian Hassan et al., (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Investor asing membawa keahlian dalam manajemen pajak internasional sehingga perusahaan dapat memanfaatkan jaringan lintas batas untuk meminimalkan beban pajak domestik secara efektif. Kepemilikan asing memberikan akses pada strategi *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax treaty* yang memungkinkan pengalihan laba ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah. Manajemen perusahaan dengan keterlibatan asing yang tinggi cenderung memprioritaskan efisiensi kas global untuk memenuhi ekspektasi investor dari luar negeri. Hassan et al., (2022) mencatat bahwa perusahaan dengan modal asing memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi karena fleksibilitas dalam struktur permodalan internasional yang dimiliki oleh entitas tersebut. Tekanan untuk berkompetisi di pasar global memaksa perusahaan untuk terus mencari cara dalam menurunkan biaya operasional melalui skema penghindaran pajak yang rumit.

Putri et al., (2024) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung melakukan praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan transaksi lintas negara dan *transfer pricing*. Fuadi et al., (2024) juga menunjukkan bahwa investor asing mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak guna meningkatkan profitabilitas perusahaan secara global. Selain itu, Anggreini & Kusuma, (2024) menyatakan bahwa kepemilikan asing memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan memiliki akses terhadap strategi perpajakan internasional yang lebih kompleks. Penelitian Firmansyah et al., (2022) turut menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dengan keterlibatan investor asing memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan domestik.

H5: Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.6. Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Keluarga merupakan kepemilikan saham oleh keluarga yang memiliki kontrol terhadap perusahaan. Perusahaan keluarga cenderung berorientasi pada peningkatan kekayaan keluarga sehingga dapat mendorong praktik *tax avoidance*. Penelitian Anggreini & Kusuma, (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Fuadi et al., (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga meningkatkan praktik *tax avoidance*

Perusahaan keluarga sering kali memiliki kendali yang sangat tersentralisasi sehingga keputusan strategis mengenai pajak sangat bergantung pada keinginan pemilik saham pengendali dalam garis keturunan. Keluarga pemilik cenderung mendorong manajemen untuk melakukan *tax avoidance* guna melindungi aset keluarga dari beban pajak yang dianggap dapat mengurangi kekayaan turun-temurun. Keterlibatan anggota keluarga dalam struktur direksi mempermudah koordinasi untuk menjalankan transaksi hubungan istimewa yang bertujuan memperkecil penghasilan kena pajak.

Arifin et al., (2023) menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* karena keputusan perusahaan lebih terpusat pada kepentingan keluarga pengendali. Putri et al., (2024) juga menemukan bahwa keterlibatan keluarga dalam manajemen perusahaan dapat mendorong praktik penghindaran pajak guna menjaga kekayaan keluarga dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selain itu, Hassan et al. (2022) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga cenderung melakukan efisiensi pajak untuk mempertahankan stabilitas kekayaan dan keberlangsungan bisnis keluarga. Penelitian Firmansyah et al., (2022) turut menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan eksternal pada perusahaan keluarga memberikan peluang bagi manajemen untuk menjalankan strategi *tax avoidance* secara lebih agresif.

H6: Kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.7. Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Koneksi Politik merupakan hubungan perusahaan dengan pihak pemerintah atau pejabat publik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki akses terhadap kebijakan tertentu yang dapat dimanfaatkan dalam *praktik tax avoidance*. Penelitian Anggreini & Kusuma, (2024) menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian Hassan et al., (2022) menunjukkan bahwa kekuatan dan pengaruh pihak internal perusahaan dapat mendorong praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, koneksi politik tetap dianggap memiliki potensi dalam mempengaruhi *tax avoidance*.

Keberadaan tokoh politik dalam struktur organisasi memberikan jaminan keamanan bagi manajemen untuk melakukan praktik perpajakan yang agresif tanpa harus khawatir terhadap sanksi administratif yang berat. Koneksi politik memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan kemudahan dalam interpretasi regulasi pajak sehingga beban fiskal yang dibayarkan menjadi lebih rendah dibandingkan perusahaan pesaing. Manajemen memanfaatkan hubungan baik dengan pengambil kebijakan untuk memperoleh informasi mengenai celah regulasi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan secara luas. Yusuf et al.,(2025) membuktikan bahwa afiliasi politik memberikan kekuatan tawar yang signifikan bagi perusahaan dalam menghadapi audit atau pemeriksaan oleh pajak. Penelitian Istiqfarosita & Abdani (2022) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau tokoh politik cenderung memperoleh berbagai keuntungan, seperti kemudahan akses pendanaan, rendahnya risiko pemeriksaan pajak, serta perlakuan khusus dari pemerintah. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih leluasa melakukan perencanaan pajak yang agresif karena merasa memiliki perlindungan politik yang dapat mengurangi risiko pengawasan dari otoritas perpajakan.

Firmansyah et al., (2022) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* karena memiliki perlindungan dan akses terhadap kebijakan tertentu. Putri et al. (2024) juga menyatakan bahwa perusahaan yang terhubung dengan pihak politik

memiliki kecenderungan lebih besar dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Selain itu, Arifin et al., (2023) menjelaskan bahwa koneksi politik memberikan keuntungan informasi dan kekuatan tawar bagi perusahaan dalam menghadapi pengawasan otoritas pajak. Penelitian Fuadi et al., (2024) turut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki afiliasi politik cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik.

H7: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena data yang dianalisis berupa angka-angka yang diolah secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian (Sugiyono, 2021). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel yang diteliti secara objektif dan terukur

3.2. Lokasi Penelitian

Data penelitian ini diperoleh melalui pengaksesan laporan keuangan tahunan perusahaan – perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan tersebut diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id/id>) serta dari situs resmi masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Pemilihan lokasi penelitian pada situs-situs tersebut dilakukan karena menyediakan data yang lengkap dan dapat diakses secara terbuka, sehingga mendukung analisis variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, koneksi politik dan *tax avoidance*. Data tersebut dinilai representatif dalam menggambarkan kondisi

kondisi keuangan dan kebijakan perpajakan perusahaan – perusahaan sektor manufaktur selama periode 2018–2025

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti sebagai ruang lingkup generalisasi dalam analisis serta penarikan kesimpulan. Populasi tidak hanya mencakup jumlah objek yang diteliti, tetapi juga seluruh karakteristik atau sifat yang melekat pada objek tersebut (Sugiyono, 2021). Penetapan karakteristik populasi yang tepat penting dilakukan agar penelitian memiliki relevansi dan ketepatan dalam menjawab tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian terdiri dari perusahaan – perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI antara tahun 2018 hingga 2025

3.3.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi tersebut. Penentuan sampel harus dilakukan secara representatif agar kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian (Sugiyono, 2021).

3.4. Teknik Pengumpulan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* agar sejalan dengan tujuan dari penelitian. Cara ini dilakukan atas dasar pertimbangan spesifik tertentu (Sugiyono, 2021). Kriteria sampel untuk penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 - 2025
2. Perusahaan yang dimiliki asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

selama periode 2018 – 2025

3. Perusahaan yang mengalami keuntungan selama periode 2018 – 2025

Tabel 3.1 Distribusi Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 – 2025	51
2	Perusahaan yang tidak dimiliki asing (non-multinasional) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 – 2025	(5)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2018 – 2025	(11)
Total		35
TOTAL SAMPEL * PERIODE PENELITIAN		280

Sumber : Peneliti, 2026

Setelah melakukan *purposive* sampling sesuai dengan kriteria, diperoleh sampel pada penelitian sejumlah 35 data perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana periode penelitian yaitu 8 tahun

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian yaitu pengumpulan data secara dokumen dapat melalui media elektronik maupun cetak, prospektus, dan internet (Sugiyono, 2021). Data dapat diperoleh dengan mengakses laman <https://idx.co.id/> serta laman resmi perusahaan yang telah dijadikan sampel. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi EViews untuk mempermudah proses pengujian data serta pengolahan statistik dalam penelitian ini.

3.6. Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan model data panel yang

merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* selama periode 2018 sampai dengan 2025. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi perusahaan (Sugiyono, 2021). Data dalam penelitian ini diperoleh dari laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), *website* resmi perusahaan, serta laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini meliputi kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga serta koneksi politik. Variabel kepemilikan diukur berdasarkan persentase kepemilikan saham, sedangkan koneksi politik diukur menggunakan variabel *dummy*

3.7. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel ialah suatu identifikasi peneliti terhadap variabel yang digunakan dan dapat diambil kesimpulan atasnya (Sugiyono, 2021). Dua jenis variabel dipergunakan dalam studi ini, yaitu variabel independen (*independent*), variabel terikat (*dependent*). Variabel yang digunakan pada riset ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

3.7.1. Variabel dependen

Variabel dependen ialah hasil atau terpengaruh oleh variabel bebas (Sugiyono, 2021). Variabel terikat dalam studi ini adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dilakukan melalui berbagai strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Hassan et al., 2022). Proksi yang diterapkan dalam penelitian adalah *Effective Tax Rate (ETR)*. Pengukuran *tax avoidance* digambarkan dalam rumus berikut ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.7.2. Variabel Independen

Variabel independen berperan sebagai elemen yang menjadi alasan munculnya variabel dependen (Sugiyono, 2021). Dalam penelitian, kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan koneksi politik

3.7.2.1 Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui lembaga negara. Kepemilikan ini menunjukkan adanya keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan, sehingga perusahaan cenderung berada di bawah pengawasan yang lebih ketat (Anggreini & Kusuma, 2024). Proksi yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah terhadap total saham yang beredar. Pengukuran kepemilikan pemerintah digambarkan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.7.2.2 Kepemilikan Direksi

Kepemilikan direksi diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak direksi (Hassan et al., 2022). Proksi yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki direksi terhadap total saham beredar. Pengukuran kepemilikan direksi digambarkan dalam rumus berikut ini

$$\text{Kepemilikan Direksi} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki direksi}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.7.2.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan bersama oleh berbagai entitas yang diklasifikasikan sebagai lembaga, termasuk yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan korporasi seperti PT (Prasetyo, 2023). Proksi yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusional terhadap total saham beredar. Pengukuran kepemilikan institusional digambarkan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.7.2.4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan oleh manajemen mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh para manajer, yang diukur berdasarkan proporsi saham yang dipegang oleh para manajer sebagaimana tercantum dalam laporan perusahaan. Persentase kepemilikan tersebut dapat ditentukan dengan menganalisis dokumen keuangan (Zalogo et al., 2022). Proksi yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki manajer terhadap total saham beredar. Pengukuran kepemilikan manajerial digambarkan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajer}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.7.2.5. Kepentingan Asing

Kepemilikan asing sangat penting bagi perusahaan karena kehadiran investor asing berarti perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang baik, sehingga menarik investor lain untuk berinvestasi di perusahaan tersebut (Rahmawati & Lisiantara, 2023). Proksi yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki institusi atau individu asing terhadap total saham beredar. Pengukuran kepemilikan asing digambarkan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki asing}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.7.2.6. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang diwariskan melalui garis keturunan keluarga, dengan keturunan selanjutnya mewarisi dan secara langsung melanjutkan bisnis tersebut (Tarmizi & Perkasa, 2022). Proksi yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki keluarga terhadap total saham beredar. Pengukuran kepemilikan keluarga digambarkan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Kepemilikan Keluarga} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki keluarga}}{\text{Total saham beredar}}$$

3.7.2.3 Koneksi Politik

Koneksi Politik merupakan hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah atau pejabat publik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan perusahaan. Hubungan politik sering terjadi di negara-negara berkembang, yang dilakukan dengan menempatkan pihak-pihak yang dekat dengan pemerintah, sehingga terjalinlah hubungan dengan pemerintah di dalam hierarki organisasi, baik dari kalangan komisaris

maupun direksi perusahaan (Apriliani & Wulandari, 2023). Proksi koneksi politik dapat diukur dengan variabel *dummy* berikut ini:

- i. 0 = perusahaan yang tidak memenuhi kriteria keterkaitan politik
- ii. 1 = perusahaan yang memenuhi kriteria keterkaitan politik

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

N	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1	Dependen <i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Rasio
2	Independen Kepemilikan Pemerintah	Kepemilikan pemerintah merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun melalui lembaga negara	$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Total saham beredar}}$	Rasio
3	Independen Kepemilikan Direksi	Kepemilikan direksi diartikan sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak direksi	$\text{Kepemilikan Direksi} = \frac{\text{Saham yang dimiliki direksi}}{\text{Total saham beredar}}$	Rasio
4	Independen Kepemilikan Institusional	institusional mengacu pada kepemilikan bersama oleh berbagai entitas	$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}}$	

		lembaga yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, dan korporasi		Rasio
5	Independen Kepemilikan Manajemen	Kepemilikan oleh manajemen mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh para manajer	Kepemilikan Manajerial= <u>Saham yang dimiliki Manajerial</u> Total saham beredar	Rasio
6	Independen Kepemilikan Asing	Kepemilikan asing sangat penting bagi perusahaan karena kehadiran investor asing berarti perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang baik	Kepemilikan Asing= <u>Saham yang dimiliki asing</u> Total saham beredar	Rasio
7	Independen Kepemilikan Keluarga	Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan saham dalam suatu perusahaan yang diwariskan melalui garis keturunan keluarga	Kepemilikan Keluarga= <u>Saham yang dimiliki keluarga</u> Total saham beredar	Rasio
8	Independen Koneksi Politik	Koneksi Politik merupakan hubungan antara perusahaan dengan pihak pemerintah	Koneksi politik= 0= tidak memiliki koneksi politik 1= memiliki koneksi politik	Dummy

3.8 Analisis Data

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2018). Variabel yang dianalisis meliputi tax avoidance, kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan koneksi politik.

3.7.3. Analisis Pemilihan Model

Pemilihan model yang tepat dalam analisis data panel sangat penting agar diperoleh model regresi yang paling sesuai. Ada tiga jenis model yang diterapkan dalam proses ini, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Random Effect Model* (REM), dan *Fixed Effect Model* (FEM). Ketika menentukan model terbaik di antara ketiga model, perlu dilakukan tiga jenis pengujian sebagai berikut:

3.7.3.1. Uji Chow

Uji *Chow* adalah suatu pengujian yang digunakan untuk memilih model CEM atau FEM mana yang lebih tepat dalam mengestimasi data panel. Proses Uji *Chow*, data dijalankan melalui model CEM dan FEM (Widarjono, 2018). Hipotesis yang diuji ini adalah:

- 1) H_0 : CEM
- 2) H_1 : FEM

Kesimpulan Uji *Chow*:

- 1) Nilai *Probabilitas Cross-section Chi-Square* lebih kecil ($<$) 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Nilai *Probabilitas Cross-section Chi-Square* lebih besar ($>$) 0.05,

- 3) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jika temuan uji tersebut ditetapkan model CEM yang dipakai, maka perlu dilakukan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk membedakan antara model CEM dan
- 4) REM. Jika hasil Uji *Chow* mengindikasikan model FEM yang benar, maka selanjutnya perlu dilakukan Uji *Hausman* untuk memilih antara model FEM atau REM.

3.7.3.2. Uji Hausman

Uji *Hausman* ialah pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah FEM atau REM lebih sesuai untuk mengestimasi data panel. Proses Uji *Hausman* memerlukan estimasi data dengan model efek tetap dan acak, yang kemudian diuji menggunakan Uji *Hausman* yang mempertimbangkan korelasi antar efek acak. Hipotesis penelitian ini adalah::

- 1) H_0 : REM
- 2) H_1 : FEM

Kesimpulan dari hasil Uji *Hausman*:

- 1) Nilai *Probabilitas Cross-section Random* lebih kecil ($<$) 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- 2) Nilai *Probabilitas Cross-section Random* lebih besar ($>$) 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.7.3.3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Penerapan Uji LM bertujuan untuk memilih antara CEM atau REM. Data perlu diestimasi dengan model efek umum dan efek acak, lalu diuji lebih lanjut menggunakan Uji LM yang melibatkan efek acak yang tidak terduga. Hipotesis untuk uji ini ialah:

- 1) H_0 : CEM
- 2) H_1 : REM

Kesimpulan dari Uji LM:

- 1) Apabila nilai *Cross-section Breusch-Pagan* kurang dari ($<$) 0,05, maka H_0 ditolak, yang berarti CEM dipilih.
- 2) Jika nilai *Cross-section Breusch-Pagan* lebih besar ($>$) 0,05, maka H_0 tidak diterima, yang berarti REM dipilih.

3.7.4. Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggabungkan data *cross section* dan *time series* sehingga dapat memberikan hasil estimasi yang lebih akurat (Gujarati & Porter, 2018). Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen meliputi kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan koneksi politik. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$TA = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 KD + \beta_3 KI + \beta_4 KM + \beta_5 KA + \beta_6 KK + \beta_7 KoP + e$$

Keterangan :

TA = *Tax Avoidance* (variabel dependen)

α = Konstanta

β_1 – β_7 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

KP = Kepemilikan Pemerintah

KD = Kepemilikan Direksi

KI = Kepemilikan Institusional

KM = Kepemilikan Manajerial

KA = Kepemilikan Asing

KK = Kepemilikan Keluarga

KoP = Koneksi Politik

e = Error

3.7.5. Uji Asumsi Klasik

3.7.5.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah sebuah data mendekati distribusi normal. Uji Normalitas berkaitan dengan kondisi distribusi probabilitas. Asumsi yang dibuat faktor pengganggu mempunyai nilai rata-rata yang diharapkan adalah sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari nilai Jarque- Bera atau nilai probabilitasnya (Pambuko & Masrini, 2023) Hipotesis untuk uji ini

H0 : sampel berdistribusi normal

H1 : sampel berdistribusi tidak normal

Penentuan model persamaan mengalami normal atau tidak dilihat dari nilai JB atau probabilitas

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H0 diterima
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H1 diterima

3.7.5.2. Uji Multikolinearitas

Uji *multikolinieritas* dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan erat antara variabel bebas. salah satu asumsi dalam regresi berganda dengan metode OLS adalah tidak adanya hubungan linier di antara variabel. Jika terdapat hubungan linier antara variabel independen dalam satu regresi, hal tersebut disebut *Multikolinieritas*. Studi ini menerapkan pengujian multikolinearitas dengan menganalisis nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam Statistik Kolinier. Model regresi efektif memerlukan tidak adanya masalah *multikolinearitas*. (Ghozali, 2018).

Penentuan model persamaan mengalami *multikolinearitas* atau tidak dilihat dari nilai VIF.

- 1) Nilai VIF > 10 atau nilai TOL = 0, model persamaan mengalami *multikolinearitas*.
- 2) Nilai VIF < 10 atau nilai TOL = 1, model persamaan tidak mengalami *multikolinearitas*.

3.7.5.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* adalah mengetahui atau menguji apakah dalam model regresi ada atau terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap berarti terjadi *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik jika tidak terjadi *heteroskedastisitas* atau *homoskedastisitas* (Ghozali, 2018). Hipotesis untuk uji ini

H0 : terdapat heteroskedastisitas

H1 : tidak terdapat heteroskedastisitas

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika $c_2 \text{ hitung} < c_2 \text{ tabel}$ maka tidak terdapat heteroskedastisitas, artinya tolak H0.
- 2) Jika $c_2 \text{ hitung} > c_2 \text{ tabel}$ maka terdapat heteroskedastisitas, artinya tidak tolak H0.

3.7.6. Uji Hipotesis

Terdapat tiga uji yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

3.7.6.1. Uji signifikansi parameter individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual atau Uji T dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan masing-masing variabel berdasarkan tingkat signifikansi dengan variabel dependen, pada tingkat signifikansi 5%, 10%, dan 15% menguraikan bahwa pengujian ini dilakukan untuk memahami seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya tetap (Ghozali, 2018).

Kriteria uji Sig. dengan $\alpha = 0,05$ sebagai berikut:

- 1) Nilai Sig. t kurang dari atau sama dengan ($\leq$) 0,05, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima
- 2) Jika nilai Sig. t lebih kecil ($>$) 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak.

3.7.6.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018).

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara simultan
- 2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak berpengaruh secara simultan

3.7.6.3. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

bahwa pengaruh semua variabel independen terhadap variabel Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Gujarati & Porter, 2018). Semakin besar nilai R^2 , maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi *tax avoidance*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, serta koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diperoleh 35 perusahaan dengan total 280 observasi yang selanjutnya diolah menggunakan aplikasi E-Views 12.

4.1.2 Analisis Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian (Ghozali, 2018). Hasil statistik deskriptif penelitian ini disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Rata-Rata	0.218925	0.114014	0.354158	0.476036	0.064301	0.203441	0.384158	0.108602
Tengah	0.210000	0.000000	0.310000	0.377900	0.000000	0.090000	0.450000	0.000000
Tertinggi	0.380000	0.640000	0.690000	0.999058	0.580000	0.680000	0.650000	0.300000
Terendah	0.070000	0.000000	0.000000	0.000130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev	0.047623	0.227284	0.261402	0.374835	0.131563	0.233610	0.218939	0.144433
Pengamatan	280	280	280	280	280	280	280	280

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan tabel 4.1, statistik deskriptif menghasilkan

Tax Avoidance yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* memperoleh angka terendah sebesar 0,070000, nilai tersebut terjadi pada PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2023, memperoleh angka tertinggi sebesar 0,380000, nilai tersebut terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2022, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,218925, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,047623.

Kepemilikan Pemerintah memperoleh angka terendah sebesar 0,000000, nilai tersebut terjadi pada PT Indofarma Tbk pada tahun 2018, memperoleh angka tertinggi sebesar 0,640000, nilai tersebut terjadi pada PT HOKI Tbk pada tahun 2022, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,114014, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,227284.

Kepemilikan Direksi memperoleh angka terendah sebesar 0,000000, nilai tersebut terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018, memperoleh angka tertinggi sebesar 0,690000, nilai tersebut terjadi pada PT HOKI Tbk pada tahun 2023, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,354158, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,261402.

Kepemilikan Institusional memperoleh angka terendah sebesar 0,000130, nilai tersebut terjadi pada PT Akasha Wira International Tbk pada tahun 2024, memperoleh angka tertinggi sebesar 0,999058, nilai tersebut terjadi pada PT Indofarma Tbk pada tahun 2022, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,476036, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,374835.

Kepemilikan Manajerial memperoleh angka terendah sebesar 0,000000, nilai tersebut terjadi pada PT Indofarma Tbk pada tahun 2018, memperoleh angka tertinggi sebesar 0,580000, nilai tersebut terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2021, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,064301, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,131563.

Kepemilikan Asing memperoleh angka terendah sebesar 0,000000, nilai tersebut terjadi pada PT Indofarma Tbk pada tahun 2018, memperoleh angka tertinggi sebesar 0,680000, nilai tersebut terjadi pada PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2025, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,203441, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,233610

Kepemilikan Keluarga memperoleh angka terendah sebesar 0,000000, nilai tersebut terjadi pada PT Indofarma Tbk pada tahun 2018, memperoleh

angka tertinggi sebesar 0,650000, nilai tersebut terjadi pada PT HOKI Tbk pada tahun 2018, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,384158, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,218939.

Koneksi Politik memperoleh angka terendah sebesar 0,000000, nilai tersebut terjadi pada PT Pyridam Farma Tbk pada tahun 2018, memperoleh angka tertinggi sebesar 0,300000, nilai tersebut terjadi pada PT HOKI Tbk pada tahun 2025, memperoleh angka rata-rata sebesar 0,108602, dan memperoleh angka standar deviasi sebesar 0,144433.

4.1.3 Uji Pemilihan Model

4.1.3.1 Uji Chow

Uji *Chow* adalah suatu pengujian yang digunakan untuk memilih model CEM atau FEM mana yang lebih tepat dalam mengestimasi data panel. Proses Uji *Chow*, data dijalankan melalui model CEM dan FEM (Widarjono, 2018). Hasil uji *chow* penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	2.532424	(34,237)	0.0000
Cross-section Chi-Square	86.464657	34	0.0000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Pada hasil tabel 4.2 menunjukkan hasil *Cross-section Chi-Square* nilai probabilitas nya yaitu 0.0000. Nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu kurang dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model optimal adalah *Fixed Effect Model (FEM)*

4.1.3.2. Uji Hausman

Uji *Hausman* ialah pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah FEM atau REM lebih sesuai untuk mengestimasi data panel. Proses Uji *Hausman* memerlukan estimasi data dengan model efek tetap dan acak, yang kemudian diuji menggunakan Uji *Hausman* yang mempertimbangkan korelasi

antar efek acak. Hasil Uji *Hausman* penelitian ini disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	5.922876	7	0.5488

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan hasil *Cross-section Random* memiliki nilai probabilitas sebesar 0.5488. Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model optimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*.

4.1.3.3. Uji Langrange Multiplier

Penerapan Uji LM bertujuan untuk memilih antara CEM atau REM. Data perlu diestimasi dengan model efek umum dan efek acak, lalu diuji lebih lanjut menggunakan Uji LM yang melibatkan efek acak yang tidak terduga. Hasil Uji *Langrange Multiplier* penelitian ini disajikan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Uji *Langrange Multiplier*

Test Hypothesis			
	Cross-section	Time	Both
Breus ch-Pagan	19.29245	16.45982	35.75227
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
Honda	4.392317	4.057070	5.974619
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
King-Wu	4.392317	4.057070	5.509429
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0000)
Standardized Honda	5.481579	4.455430	2.175403
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0148)
Standardized King-Wu	5.481579	4.455430	2.439430
	(0.0000)	(0.0000)	(0.0074)
Gourieroux, et al.			35.75227
			(0.0000)

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

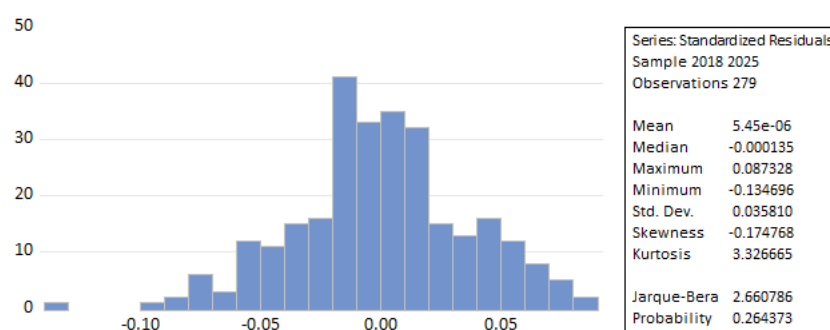
Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan hasil *Breusch-Pagan Cross-section* memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000, Nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0.05 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model optimal yang digunakan berdasarkan uji *Lagrange Multiplier* adalah *Random Effect Model (REM)*

Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model data panel melalui Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier*, model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Oleh karena itu, analisis regresi data panel pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Random Effect Model (REM)*.

4.1.4. Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah ingin mengetahui apakah sebuah data mendekati distribusi normal. Uji Normalitas berkaitan dengan kondisi distribusi probabilitas. Asumsi yang dibuat faktor pengganggu mempunyai nilai rata-rata yang diharapkan adalah sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Hasil Uji Normalitas penelitian ini disajikan pada Tabel 4.5



Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5, hasil uji normalitas Nilai Jarque-Bera sebesar 2,660786 dan nilai probabilitas sebesar 0,264373 > 0,05, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal dan model penelitian telah memenuhi asumsi normalitas.

4.1.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji *Multikolinieritas* dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ikatan erat antara variabel bebas. salah satu asumsi dalam regresi berganda dengan metode OLS adalah tidak adanya hubungan linier di antara variabel. Hasil Uji *Multikolinearitas* penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
X1	1.000000	0.235771	0.092737	-0.157482	-0.270852	-0.101561	0.319019
X2	0.235771	1.000000	0.769981	-0.246196	-0.550771	0.316467	-0.003428
X3	0.092737	0.769981	1.000000	-0.084994	-0.504191	0.307440	0.068979
X4	-0.157482	-0.246196	-0.084994	1.000000	-0.217825	0.125470	-0.087140
X5	-0.270852	-0.550771	-0.504191	-0.217825	1.000000	-0.423322	-0.014633
X6	-0.101561	0.316467	0.307440	0.125470	-0.423322	1.000000	-0.258331
X7	0.319019	-0.003428	0.068979	-0.087140	-0.014633	-0.258331	1.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh nilai koefisien korelasi antarvariabel independen tidak melebihi 0,80. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas, sehingga seluruh variabel independen layak digunakan dalam analisis regresi data panel.

4.1.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* adalah mengetahui atau menguji apakah dalam model regresi ada atau terjadinya ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap berarti terjadi *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik jika tidak terjadi *heteroskedastisitas* atau *homoskedastisitas* (Ghozali, 2018). Hasil Uji *Heteroskedastisitas* penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	1.830506	Prob. F(7,272)	0.0815
Obs*R-squared	12.59699	Prob. Chi-Square(7)	0.0826
Scaled explained SS	12.44949	Prob. Chi-Square(7)	0.0867

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0,0826 lebih besar dari 0,05 ($0,0826 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model penelitian, sehingga model penelitian memenuhi asumsi homoskedastisitas.

4.1.5. Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggabungkan data *cross section* dan *time series* sehingga dapat memberikan hasil estimasi yang lebih akurat (Gujarati & Porter, 2018). Hasil Regresi data panel penelitian ini disajikan pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Analisi Regresi Data Panel

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.175165	0.013810	12.68361	0.0000
X1	0.111853	0.013772	8.121709	0.0000
X2	0.067868	0.020130	0.371511	0.9938
X3	0.000352	0.003009	0.117111	0.9069
X4	0.104590	0.019301	5.418732	0.0000
X5	0.067450	0.017356	3.886298	0.0001
X6	-0.032133	0.011375	-2.824828	0.0051
X7	0.007603	0.007227	1.051976	0.0293

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan pada Tabel 4.8, persamaan dari model regresi yang dianalisis dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 0.175165 + 0.111853X_1 + 0.067868X_2 + 0.000352X_3 + 0.104590X_4 + 0.067450X_5 - 0.032133X_6 + 0.007603X_7$$

1. Konstanta = 0.175165

Artinya jika tidak ada variabel kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, dan koneksi politik yang mempengaruhi *tax avoidance*, maka *tax avoidance* sebesar 0.175165 satuan.

2. $b_1 = 0.111853$

Artinya jika variabel kepemilikan pemerintah meningkat sebesar satu satuan maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.111853 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

3. $b_2 = 0.067868$

Artinya jika variabel kepemilikan direksi meningkat sebesar satu satuan maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.067868 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4. $b_3 = 0.000352$

Artinya jika variabel kepemilikan institusional meningkat sebesar satu satuan maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.000352 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

5. $b_4 = 0.104590$

Artinya jika variabel kepemilikan manajerial meningkat sebesar satu satuan maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.104590 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

6. $b_5 = 0.067450$

Artinya jika variabel kepemilikan asing meningkat sebesar satu satuan maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.067450 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

7. $b_6 = -0.032133$

Artinya jika variabel kepemilikan keluarga meningkat sebesar satu satuan maka *tax avoidance* akan menurun sebesar -0.032133 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

8. $b_7 = 0.007603$

Artinya jika variabel koneksi politik meningkat sebesar satu satuan maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.007603 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

4.1.6. Uji Hipotesis

4.1.6.1. Uji signifikansi parameter individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual atau Uji T dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan masing-masing variabel berdasarkan tingkat signifikansi dengan variabel dependen, pada tingkat signifikansi 5%, 10%, dan 15% (Ghozali, 2018). Hasil uji t penelitian ini disajikan pada Tabel 4.9

Tabel 4.9 Uji signifikansi parameter individual

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
X1	0.111853	0.013772	8.121709	0.0000
X2	0.067868	0.020130	0.371511	0.9938
X3	0.000352	0.003009	0.117111	0.9069
X4	0.104590	0.019301	5.418732	0.0000
X5	0.067450	0.017356	3.886298	0.0001
X6	-0.032133	0.011375	-2.824828	0.0051
X7	0.007603	0.007227	1.051976	0.0293

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan pada Tabel 4.9, Uji signifikansi parameter individual yang dianalisis

Variabel X1 (Kepemilikan Pemerintah) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,111853; t hitung sebesar 8,121709 dan prob sebesar $0,0000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa X1 (Kepemilikan Pemerintah) Berpengaruh Positif terhadap Y (*Tax Avoidance*). Maka Hipotesis 1 di Terima.

Variabel X2 (Kepemilikan Direksi) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,067868; t hitung sebesar 0,371511 dan prob sebesar $0,9938 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa X2 (Kepemilikan Direksi) Tidak Berpengaruh terhadap Y (*Tax Avoidance*). Maka Hipotesis 2 di Tolak.

Variabel X3 (Kepemilikan Institusional) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,000352; t hitung sebesar 0,117111 dan prob sebesar $0,9069 > 0,05$ maka dapat

disimpulkan bahwa X3 (Kepemilikan Institusional) Tidak Berpengaruh terhadap Y (*Tax Avoidance*). Maka Hipotesis 3 di Tolak.

Variabel X4 (Kepemilikan Manajerial) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,104590; t hitung sebesar 5,418732 dan prob sebesar $0,0000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa X4 (Kepemilikan Manajerial) Berpengaruh Positif terhadap Y (*Tax Avoidance*). Maka Hipotesis 4 di Terima.

Variabel X5 (Kepemilikan Asing) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,067450; t hitung sebesar 3,886298 dan prob sebesar $0,0001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa X5 (Kepemilikan Asing) Berpengaruh Positif terhadap Y (*Tax Avoidance*). Maka Hipotesis 5 di Terima.

Variabel X6 (Kepemilikan Keluarga) didapatkan nilai koefisien sebesar -0,032133; t hitung sebesar -2,824828 dan prob sebesar $0,0051 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa X6 (Kepemilikan Keluarga) Berpengaruh Negatif terhadap Y (*Tax Avoidance*). Maka Hipotesis 6 di Terima.

Variabel X7 (Koneksi Politik) didapatkan nilai koefisien sebesar 0,007603; t hitung sebesar 1,051976 dan prob sebesar $0,0293 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa X7 (Koneksi Politik) Berpengaruh Positif terhadap Y (*Tax Avoidance*). Maka Hipotesis 7 di Terima.

4.1.6.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Hasil uji f penelitian ini disajikan pada Tabel 4.10

Tabel 4.10 Uji Simultan

Sum squared resid	0.354310	F-statistic	30.17591
Durbin-Watson stat	1.707222	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan pada Tabel 4.10, uji simultan didapatkan nilai prob. sebesar $0,000000 < 0,05$. Maka Terdapat Pengaruh secara Simultan. Maka Hipotesis di Terima.

4.1.6.3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Gujarati & Porter, 2018). Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini disajikan pada Tabel 4.11

Tabel 4.11 Uji koefisien determinasi

R-squared	0.438029
Adjusted R square	0.423513

Sumber: Data diolah dengan Eviews 12, (2026)

Berdasarkan pada Tabel 4.11, uji koefisien determinasi nilai *adjusted r square* sebesar 0.438029. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh independent terhadap dependent sebesar 42,35%. Sisanya 57.65% (100% - 42,35%) dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H1 diterima. Berdasarkan teori dari Hanlon & Heitzman (2010) ETR memiliki arah hubungan terbalik dengan tingkat penghindaran pajak. Dengan demikian, koefisien positif pada ETR ini membuktikan bahwa peningkatan Kepemilikan Pemerintah akan menaikkan nilai ETR, yang secara otomatis mengindikasikan penurunan praktik *Tax Avoidance*. Peningkatan saham pemerintah memperketat fungsi pengawasan, sehingga manajemen cenderung lebih patuh pajak dan menghindari tindakan agresif.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan pemerintah cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah sebagai pemegang saham memiliki kepentingan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan

perpajakan yang berlaku. Pengawasan yang lebih ketat tersebut dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Dalam Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), keberadaan pemerintah sebagai salah satu pemegang saham dapat memperkuat mekanisme pengawasan terhadap manajemen. Pengawasan tersebut mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga keputusan yang diambil perusahaan cenderung mengarah pada kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggreini & Kusuma (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan pemerintah, maka semakin rendah praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan Firmansyah et al. (2022) yang menyatakan bahwa keterlibatan pemerintah dalam struktur kepemilikan dapat menekan praktik *Tax Avoidance* karena perusahaan berada dalam pengawasan regulator dan masyarakat. Selain itu, Hassan et al., (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena mempertimbangkan reputasi dan tanggung jawab publik. Putri et al. (2024) juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan agresivitas pajak dibandingkan perusahaan non-pemerintah.

4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Direksi terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,9938 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H2 ditolak. Variabel Kepemilikan Direksi memiliki koefisien sebesar 0.067868 yang menunjukkan bahwa perubahan Kepemilikan Direksi belum mampu memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya saham yang dimiliki oleh direksi belum mampu memengaruhi kebijakan perusahaan dalam menentukan strategi

perpajakan. Direksi cenderung lebih berfokus pada keberlangsungan operasional perusahaan dan pencapaian tujuan bisnis dibandingkan mengambil keputusan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Selain itu, proporsi kepemilikan saham oleh direksi pada perusahaan sampel cenderung relatif kecil sehingga tidak memiliki pengaruh yang dominan dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Dalam Teori Agensi yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976), kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Namun, apabila proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi relatif kecil, maka kemampuan direksi dalam memengaruhi kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan kepemilikan direksi belum mampu menjadi faktor yang menentukan dalam praktik *tax avoidance*

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Putri et al. (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh dewan direksi dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Selain itu, Firmansyah et al. (2022) juga menyatakan bahwa kekuatan internal perusahaan, termasuk direksi yang memiliki kepemilikan saham, dapat memengaruhi kebijakan *tax avoidance* perusahaan secara signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel, periode penelitian, dan struktur kepemilikan perusahaan yang digunakan. Pada penelitian ini, proporsi kepemilikan saham oleh direksi relatif kecil sehingga belum mampu memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0.9069 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H3 diterima. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai koefisien sebesar 0,086509 yang menunjukkan bahwa peningkatan Kepemilikan Institusional akan meningkatkan nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. Karena *tax*

avoidance diproksikan menggunakan ETR, maka peningkatan ETR mengindikasikan penurunan praktik *tax avoidance*. Dengan demikian, Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka semakin kuat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen perusahaan. Investor institusional umumnya memiliki kemampuan analisis yang baik, sumber daya yang memadai, serta akses informasi yang luas sehingga mampu mengawasi kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Pengawasan yang lebih ketat tersebut mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Dalam Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pula kemampuan investor institusional dalam mengawasi tindakan oportunistik manajemen sehingga praktik *tax avoidance* dapat ditekan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Hassan et al., (2022) yang menyatakan bahwa investor institusional cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak guna meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan Fuadi et al., (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan karena institusi berorientasi pada peningkatan *return* investasi. Namun Penelitian ini tidak sejalan dengan Anggreini & Kusuma, (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak terdukung. Hasil pengujian membuktikan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, a kepemilikan institusional lebih berperan sebagai mekanisme tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daripada sebagai pendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kepemilikan institusional belum mampu menjelaskan variasi praktik *tax avoidance* pada perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel, periode

penelitian, dan proksi yang digunakan. Pada penelitian ini, Kepemilikan Institusional lebih berperan sebagai mekanisme pengawasan yang mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan sehingga praktik *tax avoidance* dapat ditekan.

4.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H4 diterima. Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai koefisien sebesar 0,124513 yang menunjukkan bahwa peningkatan Kepemilikan Manajerial akan meningkatkan nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. Karena *tax avoidance* diproksikan menggunakan ETR, maka peningkatan ETR mengindikasikan penurunan praktik *tax avoidance*.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin besar pula rasa tanggung jawab manajemen dalam menjaga keberlangsungan perusahaan. Manajemen yang juga bertindak sebagai pemegang saham cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Dalam Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Ketika manajemen memiliki saham perusahaan, maka tindakan oportunistik yang dapat merugikan perusahaan cenderung berkurang karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* dapat ditekan.

Penelitian ini sejalan dengan Fuadi et al., (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak terdukung. Hasil tersebut memiliki arti bahwa, semakin besar kepemilikan manajerial di perusahaan, maka semakin kecil praktik penghinnan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hasil penelitian tidak sejalan dengan

penelitian Sulfia & Rusmanto (2024) yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan Hassan et al., (2022), dan Firmansyah et al. (2022) yang menyatakan bahwa manajemen yang memiliki saham perusahaan cenderung mendorong kebijakan perpajakan yang agresif untuk meningkatkan laba setelah pajak dan nilai perusahaan. semakin kecil praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

4.2.5 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H5 diterima. Variabel Kepemilikan Asing memiliki nilai koefisien sebesar 0,067450 yang menunjukkan bahwa peningkatan Kepemilikan Asing akan meningkatkan nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. Karena *tax avoidance* diproksikan menggunakan ETR, maka peningkatan ETR mengindikasikan penurunan praktik *tax avoidance*.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing, maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan yang diberikan terhadap manajemen perusahaan. Investor asing umumnya menerapkan standar tata kelola perusahaan yang baik, transparansi yang tinggi, serta menuntut kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Dalam Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), kepemilikan asing dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Pengawasan yang lebih kuat tersebut dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen, sehingga perusahaan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan Fuadi et al., (2024) yang menyatakan pengaruh negatif kepemilikan asing pada penghindaran pajak menunjukan bahwa kepemilikan asing berperan efektif dalam melakukan pengawasan serta kehati-hatian investor asing. Untuk dapat meminimalisasi risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan

penelitian Putri et al. (2024) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung melakukan praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan transaksi lintas negara dan transfer pricing. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan Fuadi et al., (2024) yang menunjukkan bahwa investor asing mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak guna meningkatkan profitabilitas perusahaan secara global. Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel, periode penelitian, serta fungsi pengawasan investor asing yang pada penelitian ini lebih berorientasi pada kepatuhan perpajakan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dibandingkan peningkatan keuntungan jangka pendek.

4.2.6 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0051 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H6 ditolak. Variabel Kepemilikan Keluarga memiliki nilai koefisien sebesar -0,030284, namun pengaruh tersebut tidak signifikan sehingga Kepemilikan Keluarga belum mampu memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan keluarga belum tentu memengaruhi kebijakan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan. Perusahaan keluarga cenderung lebih berfokus pada keberlangsungan usaha, menjaga stabilitas perusahaan, serta mempertahankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang dibandingkan memperoleh keuntungan jangka pendek melalui praktik penghindaran pajak. Dalam Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen sehingga konflik keagenan dapat diminimalkan. Namun, pada penelitian ini kepemilikan keluarga belum mampu menjadi faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan keluarga tidak selalu memberikan pengaruh yang dominan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Hasil penelitian sejalan dengan Fuadi et al (2024) dan Anggreini & Kusuma, (2024) kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan *tax avoidance* karena keputusan perusahaan lebih terpusat pada kepentingan keluarga pengendali. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan Putri et al. (2024) yang menemukan bahwa keterlibatan keluarga dalam manajemen perusahaan dapat mendorong praktik penghindaran pajak guna menjaga kekayaan keluarga dan meningkatkan profitabilitas perusahaan

keluarga. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sudirman & Marsudi (2025). Secara teori seberapa besar keuntungan yang ditanggung pihak keluarga yang menjadi manajemen perusahaan atau pihak manajer dalam perusahaan non keluarga dapat menentukan apakah tindakan *tax avoidance* pada perusahaan keluarga lebih rendah atau lebih tinggi daripada perusahaan non- keluarga. Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan, serta perbedaan mekanisme tata kelola dan pengawasan dalam masing-masing perusahaan

keluarga.

4.2.7 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koneksi Politik berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,0293 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga H7 ditolak. Variabel Koneksi Politik memiliki nilai koefisien sebesar 0,005840, namun pengaruh tersebut tidak signifikan sehingga Koneksi Politik belum mampu memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan individu yang memiliki hubungan politik di dalam perusahaan belum tentu dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan tetap harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa bergantung pada hubungan politik yang dimiliki. Selain itu, pengawasan dari regulator dan meningkatnya transparansi perusahaan menyebabkan koneksi politik bukan lagi menjadi faktor utama yang menentukan

kebijakan perpajakan perusahaan. Dalam Teori Agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), keberadaan koneksi politik diharapkan dapat memberikan keuntungan tertentu bagi perusahaan, termasuk akses terhadap informasi dan kebijakan pemerintah. Namun, pada penelitian ini koneksi politik belum mampu memengaruhi praktik *tax avoidance* karena pengambilan keputusan perpajakan perusahaan tetap didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan tata kelola perusahaan yang baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Firmansyah. (2022) yang menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance* karena memiliki perlindungan dan akses terhadap kebijakan tertentu. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan Putri et al. (2024) yang menyatakan bahwa perusahaan yang terhubung dengan pihak politik memiliki kecenderungan lebih besar dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Namun pada penelitian Aini et al., (2026) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif signifikan. Hal ini dapat menggambarkan bahwa apabila perusahaan memiliki koneksi politik, maka perusahaan tersebut belum tentu akan meningkatkan agresivitas pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2025:

1. Variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan pemerintah, maka semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang mengindikasikan semakin rendah praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki pemerintah cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan karena berada di bawah pengawasan pemerintah dan masyarakat.
2. Variabel kepemilikan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan saham oleh direksi belum mampu memengaruhi kebijakan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakan. Direksi cenderung lebih berfokus pada keberlangsungan operasional perusahaan dan pencapaian tujuan bisnis dibandingkan mengambil keputusan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.
3. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional belum mampu memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan. Investor institusional cenderung memberikan kepercayaan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakan sehingga keberadaannya belum mampu menjadi mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik *tax avoidance*.
4. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang mengindikasikan semakin rendah praktik *tax avoidance*. Kondisi ini menunjukkan bahwa manajemen yang juga memiliki saham perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan karena mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

5. Variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan asing, maka semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang mengindikasikan semakin rendah praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa investor asing cenderung menerapkan pengawasan yang lebih baik dan mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Variabel kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan keluarga, maka semakin rendah nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang mengindikasikan semakin tinggi praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi cenderung mengambil kebijakan perpajakan yang lebih agresif untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham keluarga.
7. Variabel koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin kuat koneksi politik yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi nilai *Effective Tax Rate (ETR)* yang mengindikasikan semakin rendah praktik *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan perpajakan karena berada di bawah pengawasan pemerintah dan publik sehingga lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kepemilikan pemerintah, kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2025, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga diharapkan lebih memperhatikan struktur kepemilikan dan peran koneksi politik dalam pengambilan keputusan agar tidak mendorong praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan reputasi perusahaan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Investor tidak hanya perlu memperhatikan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga struktur kepemilikan dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan sebagai indikator tata kelola perusahaan yang baik.
3. Bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, diharapkan dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, terutama yang memiliki struktur kepemilikan tertentu, agar praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan. Selain itu, pemerintah perlu terus menyempurnakan regulasi perpajakan untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktik *tax avoidance*.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode penelitian, memperluas objek penelitian ke sektor selain manufaktur serta menggunakan proksi *tax avoidance* yang berbeda, seperti *Cash Effective Tax Rate (CETR)* atau *Book-Tax Difference (BTD)*. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain, seperti profitabilitas, leverage,

5. ukuran perusahaan, *capital intensity*, atau kualitas tata kelola perusahaan agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Aini, N., Pranata, L., & Sasana, W. (2026). Pengaruh ukuran perusahaan, komisaris independen dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 4984–4991.

Anggreini, G. M., & Kusuma, H. (2024). The Influence of Ownership Structure and Political Connections on Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 13(4), 324–334.

<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i4.3392>

Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>

Arifin, Y. N., Nurrahmawati, A., & Perwitasari, D. (2023). Does Ownership Structure Affect Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 23(1), 44–60.

Astrid Regina, Octaviantary, & Fera, D. (2023). Tax Avoidance In Review By Institutional Ownership, Firm Size, And Leverage With Profitability As A Moderation Variable (Empirical Research On Manufacturing Companies In Indonesia. *Afebi Accounting Review*, 8, No 1, 45–64.

Chen, J. (2001). Ownership Structure as Corporate Governance Mechanism: Evidence from Chinese Listed Companies. *Economics of Planning*, 34(1), 53–72.

Christensen, J., Murphy, R. (2004). The Social Irresponsibility of Corporate Tax Avoidance: Taking CSR to the bottom line. *Development*, 47(3), 37–44.

- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 83(1), 61–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Nur Aisyah Kustiani, Suparna Wijaya, Arifah Fibri Andriani, Zef Arfiansyah, L. K., & Azas Mabrur, Agung Dinarjito, Rahayu Kusumawati, M. L. M. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8, 1–13.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Fuadi, F., Sawir, R. A., Fitria Fertha Agustina, A. M., & Pratiwi, R. T. (2024). Apakah Struktur Kepemilikan Mempengaruhi Penghindaran Pajak? Bukti Empiris dari Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 29(1), 69–82.
<https://doi.org/10.23960/jak.v29i1.2053>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, & Porter, D. C. (2018). *Basic Econometrics (5th ed)*. McGraw-Hill Education.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 127–178.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hassan, M.H, M., & J.B, S. (2022). Ownership Structure And Corporate Tax Avoidance: Evidence From The Listed Companies Of Bangladesh. *Polish Journal of Accounting*

- I Of Management Studies*, 25(1), 147–158.
- <https://doi.org/10.17512/Pjms.2022.25.1.09>
- Hossain, M. S., Md.Sobhan Ali, Fung, M. I., Ling, C. C., & Yuan, C. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 759–772.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2025). *Kinerja dan tantangan perekonomian nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.*
- Isroah, Ponty, & Amanita., &. (2016). Persepsi Etika Dalam Penggelapan Pajak: Bukti Persepsi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia.*
- Istiqfarosita, M., & Abdani, F. (2022). Political connections and thin capitalization on tax avoidance during the Covid-19 pandemic. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1238–1243.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360.
- Khurana, I. K., Moser, W. J. (2010). Institutional Shareholders' Investment Horizons and Tax Avoidance. *Journal of the American Taxation Association*, 35(1), 111–134.
- Kovermann, J., & Wendt, M. (2019). Tax avoidance in family firms: Evidence from large private firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 15(2), 145–157.
- Kusuma, G. M. A. H. (2024). The influence of ownership structure and political connections on tax avoidance in Indonesia. *Research in Business & Social Science IJRBS*, 13(4), 2147–4478.

- Lim, A., & Suparman, M. (2022). The Impact of Ownership Structure and Board Characteristics on Tax Avoidance. *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan*, 5(2), 227–237.
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel moderatingTitle. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4).
- Mardatungga, Nurmawan, & Nuritomo. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & FinanceHal.*, 4, 5–11.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Managerial behavior, agency costs and ownership. *Theory of the Firm.*, 3(4), 305-360.
- Ngelo, A. A., Permatasari, Y., Harymawan, I., Anridho, N., &, & Kamarudin, K. A. (2022). Corporate tax avoidance and investment efficiency: evidence from the enforcement of tax amnesty in Indonesia. *Economies*, 10(10), 251.
- Octaviantary, A. R., & Damayanti, F. (2023). Tax Avoidance in Review by Institutional Ownership, Firm Size, and Leverage with Profitability as a Moderation Variable. *AFEBI Accounting Review*, 8(1), 45–65.
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., Srimindarti, C., & Ma'sum, M. A. (2023). The Impact of Corporate Governance and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance Policies: Indonesian Banking Sector. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3641–3647.
<https://doi.org/10.18280/ijstdp.181130>
- Prasetyo, M. S. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.

- J. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 61–69.
- Putri, V. R., Balkish, N., Jamaliah, Farha, & Rizqa. (2024). Tax Tightrope: The Perils of Foreign Ownership, Executive Incentives and Transfer Pricing in Indonesian Banking. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/jrfm17010026>
- Rahmawati, I. D., & Lisiantara, G. A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 259–266.
- Slimane, N. L. and M. Ben, Almoataz, E. S., & Karim, D. (2025). Exploring the interplay between tax avoidance, dividend policy and family ownership. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 1985–2517. <https://doi.org/10.1108/JFRA-11-2024-0821>
- Sudirman, & Marsudi, A. S. (2025a). Ownership Structure on Tax Avoidance with Independent Commissioner as Moderation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(1), 1914–1932.
- Sudirman, & Marsudi, A. S. (2025b). Ownership Structure On Tax Avoidance With Independent Commissioner As Moderation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*, 8(1), 1914–1932.
- Sugiyono, P. D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulfia, I., & Rusmanto, T. (2024). The Role of Corporate Governance in Mitigating Tax Avoidance. *Journal of Governance and Regulation*, 13(4), 236–246.
<https://doi.org/10.22495/jgrv13i4siart2>
- Susilowati, R. Y. N. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Sukarela pada Likuiditas Saham: Studi Empiris Di BEI. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*

Dan Manajemen, 10(1).

Suwiknyo, E. (2019). *Rasa Keadilan Pajak yang Terkoyak*. Ekonomi.Bisnis.Com.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190%0A807/259/1133523/rasa-keadilan-pajak%0Ayang-terkoyak>

Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61.

<https://doi.org/https://doi.org/10.59832/jpmk.v3i1.182>

Utami, N. W., & Andriani, S. (2024). Research mapping on corporate tax avoidance: Studi bibliometrix VOSviewers dan literature review. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(2), 549–555.

Widarjono. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya dengan Eviews. In *Widarjono, A. UPP STIM YKPN*.

Widayat, L. L., & Kawedar, W. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Sektor Keuangan terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–14.

Wijayanti, F., & Wafiroh, N. (2025). The influence of profitability, leverage, capital intensity, and tax haven on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019–2023. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 13(2), 191–209.

Wijayanti, D. R. (2016). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, corpoeate goverment dan kepemilikan institusionalterhadap penghindaran pajak di Indonesia perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2).

Yusuf, M., Ismail, T., Taqi, M., & Soleha, N. (2025). Political Connections and Tax Avoidance: The Role of Politically Affiliated Ownership in Corporate Tax Strategies. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(6), 199–210.

<https://doi.org/10.55214/25768484.v9i6.7788>

Zalogo, E., Duho, Y. P., & Putri, A. P. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Auditor, Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas terhadap Opini audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1101–1115.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran (Tabel Data)

Kode	Tahun	ETR	GO	BO	IO	MO	FO	FAM	PC
INAF	2018	0.3127	0.8066	0	0.9967	0	0.0007	0	1
INAF	2019	0.3241	0.8066	0	0.9984	0	0.0008	0	1
INAF	2020	0.4081	0.8066	0	0.9984	0	0.0012	0	1
INAF	2021	0.2811	0.8066	0	0.9983	0	0.0012	0	1
INAF	2022	0.2669	0.8066	0	0.9991	0	0.0006	0	1
INAF	2023	0.2651	0.8066	0	0.9991	0	0.0006	0	1
INAF	2024	0.2684	0.8066	0	0.9991	0	0.0094	0	1
INAF	2025	0.2648	0.8066	0	0.9991	0	0.0094	0	1
KAEF	2018	0.4024	0.9003	0	0.9938	0	0.0061	0	1
KAEF	2019	0.4053	0.9003	0	0.9988	0	0.0088	0	1
KAEF	2020	0.4345	0.9003	0	0.9988	0	0.0011	0	1
KAEF	2021	0.4081	0.9003	0	0.9505	0	0.0011	0	1
KAEF	2022	0.3466	0.9003	0	0.9980	0	0.0020	0	1
KAEF	2023	0.4665	0.9003	0	0.9988	0	0.0006	0	1
KAEF	2024	0.4440	0.9003	0	0.9454	0	0.0004	0	1
KAEF	2025	0.4438	0.9003	0	0.9430	0	0.0004	0	1
KLBF	2018	0.3357	0	0.0029	0.6967	0.0008	0.3030	0.5688	1
KLBF	2019	0.3322	0	0.0029	0.7544	0.0029	0.2453	0.5696	1
KLBF	2020	0.3541	0	0.0028	0.7825	0.0028	0.2171	0.5706	1
KLBF	2021	0.3672	0	0.0028	0.7468	0.0028	0.2528	0.5791	1
KLBF	2022	0.3810	0	0.0024	0.7314	0.0024	0.2683	0.5799	1
KLBF	2023	0.3050	0	0.0024	0.7290	0.0024	0.2705	0.5799	1
KLBF	2024	0.3256	0	0.0024	0.7421	0.0024	0.2576	0.5799	1
KLBF	2025	0.3400	0	0.0024	0.7865	0.0024	0.2132	0.5785	1
PYFA	2018	0.3090	0	0	0.5385	0.1731	0.0013	0.2308	0
PYFA	2019	0.2537	0	0	0.5385	0.1731	0.0013	0.2308	0
PYFA	2020	0.2543	0	0	0.3515	0.1731	0.0021	0.2308	0
PYFA	2021	0.2782	0	0	0.3420	0	0.4830	0.4048	1
PYFA	2022	0.1471	0	0	0.0830	0	0.4830	0.4048	1
PYFA	2023	0.1238	0	0	0.0830	0	0.4830	0.4048	1
PYFA	2024	0.2886	0	0	0.3583	0	0.4830	0.4048	1
PYFA	2025	0.1788	0	0	0.3583	0	0.4830	0.4048	1
SIDO	2018	0.2351	0	0	0.9480	0	0.0520	0.8100	0
SIDO	2019	0.2478	0	0	0.9480	0	0.0520	0.8100	0
SIDO	2020	0.2214	0	0	0.9519	0	0.0480	0.8100	0
SIDO	2021	0.2184	0	0	0.7158	0	0.2842	0.8048	0
SIDO	2022	0.2184	0	0.0001	0.7389	0.0001	0.2610	0.6046	1
SIDO	2023	0.2205	0	0.0001	0.7464	0.0001	0.2535	0.6046	1
SIDO	2024	0.2246	0	0.0010	0.8997	0.0001	0.1002	0.7759	1
SIDO	2025	0.2193	0	0.0010	0.9086	0.0010	0.0912	0.7759	1

DVLA	2018	0.2646	0	0	0.0196	0	0.9769	0	0
DVLA	2019	0.2638	0	0	0.0208	0	0.9767	0	0
DVLA	2020	0.2429	0	0	0.0208	0	0.9767	0	0
DVLA	2021	0.3072	0	0	0.0030	0	0.9821	0	0
DVLA	2022	0.2571	0	0	0.0037	0	0.9755	0	0
DVLA	2023	0.2365	0	0	0.0041	0	0.9731	0	0
DVLA	2024	0.2556	0	0	0.0037	0	0.9755	0	0
DVLA	2025	0.2554	0	0	0.0039	0	0.9202	0	0
MERK	2018	0.2555	0	0	0.0038	0	0.9134	0.7399	0
MERK	2019	0.2784	0	0	0.0043	0	0.9188	0.7399	0
MERK	2020	0.2217	0	0	0.0038	0	0.9142	0.7399	0
MERK	2021	0.2089	0	0	0.0035	0	0.9056	0.7399	0
MERK	2022	0.2437	0	0	0.0036	0	0.9067	0.7399	0
MERK	2023	0.1226	0	0	0.0035	0	0.9055	0.7399	0
MERK	2024	0.2265	0	0	0.0048	0	0.9039	0.7399	0
MERK	2025	0.2600	0	0	0.0035	0	0.9075	0.7399	0
TSPC	2018	0.2574	0	0	0.8217	0.0012	0.1556	0.7991	1
TSPC	2019	0.2525	0	0	0.8217	0.0012	0.1554	0.8044	1
TSPC	2020	0.3007	0	0	0.8219	0.0012	0.1554	0.8144	1
TSPC	2021	0.2808	0	0	0.8281	0.0012	0.1353	0.8165	1
TSPC	2022	0.2781	0	0	0.8425	0.0012	0.1201	0.8215	1
TSPC	2023	0.2201	0	0	0.8679	0.0012	0.0764	0.8621	1
TSPC	2024	0.3021	0	0	0.9015	0.0012	0.0318	0.8621	1
TSPC	2025	0.2871	0	0	0.9125	0.0012	0.0225	0.7376	1
GGRM	2018	0.2563	0	0	0.8650	0	0.1100	0.6929	0
GGRM	2019	0.2490	0	0	0.8630	0	0.0990	0.6929	0
GGRM	2020	0.2086	0	0	0.8550	0	0.0820	0.6929	0
GGRM	2021	0.2254	0	0	0.9210	0	0.0790	0.6929	0
GGRM	2022	0.2432	0	0	0.8400	0	0.0710	0.6929	0
GGRM	2023	0.0778	0	0	0.8450	0	0.0540	0.6929	0
GGRM	2024	0.2205	0	0	0.9440	0	0.0560	0.6929	0
GGRM	2025	0.2892	0	0	0.8460	0	0.0570	0.6929	0
HMSP	2018	0.2462	0	0	0.9644	0	0.0238	0.9250	0
HMSP	2019	0.2485	0	0	0.9787	0	0.0119	0.9250	0
HMSP	2020	0.2312	0	0	0.9498	0	0.0128	0.9250	0
HMSP	2021	0.2220	0	0	0.9415	0	0.0118	0.9250	0
HMSP	2022	0.2356	0	0	0.9452	0	0.0142	0.9250	0
HMSP	2023	0.2148	0	0	0.9422	0	0.0114	0.9250	0
HMSP	2024	0.2349	0	0	0.9438	0	0.0068	0.9244	0
HMSP	2025	0.2988	0	0	0.9424	0	0.0079	0.9244	0
ITIC	2018	0.2783	0	0.6385	0.1550	0.6385	0.0434	0.6385	0
ITIC	2019	0.2118	0	0.6385	0.1609	0.6385	0.0456	0.6385	0
ITIC	2020	0.3592	0	0.6385	0.1750	0.6385	0.0531	0.6385	0
ITIC	2021	0.2632	0	0.6385	0.1750	0.6385	0.2382	0.6385	0
ITIC	2022	0.2580	0	0.6385	0.1951	0.6385	0.0796	0.6385	0
ITIC	2023	0.2555	0	0.7489	0.1595	0.6489	0.1318	0.6489	0

ITIC	2024	0.2678	0	0.6831	0.1595	0.6831	0.1318	0.6831	0
ITIC	2025	0.2626	0	0.6831	0.1301	0.7831	0.1167	0.6831	0
WIIM	2018	0.2069	0	0	0.0310	0.0538	0.0215	0.6316	1
WIIM	2019	0.2626	0	0	0.0350	0.0538	0.0102	0.6316	1
WIIM	2020	0.1984	0	0	0.0250	0.0538	0.0202	0.6316	1
WIIM	2021	0.1769	0	0	0.0210	0.0538	0.0191	0.6316	1
WIIM	2022	0.2186	0	0	0.0385	0.0538	0.0279	0.6316	1
WIIM	2023	0.2207	0	0	0.0624	0.5356	0.0349	0.6316	1
WIIM	2024	0.1030	0	0	0.0240	0.0054	0.0390	0.6316	1
WIIM	2025	0.2359	0	0	0.3152	0.7316	0.0431	0.6316	1
KINO	2018	0.2509	0	0	0.7022	0	0.1719	0.6950	0
KINO	2019	0.1894	0	0	0.7194	0	0.1640	0.6950	0
KINO	2020	0.1590	0	0	0.7012	0	0.1433	0.7000	0
KINO	2021	0.2083	0	0	0.7020	0	0.1103	0.7000	0
KINO	2022	0.2184	0	0	0.7409	0	0.1136	0.6734	0
KINO	2023	0.3198	0	0	0.7412	0	0.1472	0.6734	0
KINO	2024	0.1678	0	0	0.7374	0	0.1471	0.7900	0
KINO	2025	0.2048	0	0	0.8261	0	0.0686	0.7900	0
UNVR	2018	0.2525	0	0	0.0581	0	0.9306	0	1
UNVR	2019	0.2534	0	0	0.0660	0	0.9210	0	1
UNVR	2020	0.2219	0	0	0.0681	0	0.9246	0	1
UNVR	2021	0.2319	0	0	0.0422	0	0.9229	0	1
UNVR	2022	0.3138	0	0	0.0422	0	0.9229	0	1
UNVR	2023	0.2259	0	0	0.2250	0	0.5421	0	1
UNVR	2024	0.2257	0	0	0.2250	0	0.5421	0	1
UNVR	2025	0.2136	0	0	0.2250	0	0.5421	0	1
MRAT	2018	0.2202	0	0	0.2147	0	0.1579	0.7126	0
MRAT	2019	0.3057	0	0	0.9141	0	0.0558	0.7128	1
MRAT	2020	0.2095	0	0	0.3141	0	0.0691	0.7126	0
MRAT	2021	0.3029	0	0	0.9257	0	0.0081	0.7126	1
MRAT	2022	0.2717	0	0	0.7141	0	0.0064	0.7126	0
MRAT	2023	0.0695	0	0	0.1137	0	0.0063	0.7126	0
MRAT	2024	0.3016	0	0	0.7138	0	0.0061	0.7126	0
MRAT	2025	0.3386	0	0	0.7967	0	0.0081	0.7126	0
ADES	2018	0.2441	0	0	0.0030	0	0.9504	0	0
ADES	2019	0.2386	0	0	0.0030	0	0.9504	0	0
ADES	2020	0.1913	0	0	0.0020	0	0.9428	0	0
ADES	2021	0.2268	0	0	0.0022	0	0.9210	0	0
ADES	2022	0.2139	0	0	0.0016	0.0007	0.9293	0	0
ADES	2023	0.2142	0	0	0.0006	0.0007	0.9252	0	0
ADES	2024	0.2101	0	0	0.0001	0.0002	0.9230	0	0
ADES	2025	0.2087	0	0	0.0045	0	0.9222	0	0
WOOD	2018	0.2575	0	0	0.9485	0.0089	0.0515	0.786	0
WOOD	2019	0.2314	0	0	0.9443	0	0.0557	0.7431	0
WOOD	2020	0.2235	0	0	0.8947	0	0.1053	0.719	0
WOOD	2021	0.2285	0	0	0.9012	0	0.0968	0.7189	0
WOOD	2022	0.2425	0	0.0118	0.9867	0.0118	0.0835	0.7105	0

WOOD	2023	0.2993	0	0.0114	0.9668	0.0114	0.0533	0.7105	0
WOOD	2024	0.2363	0	0.0114	0.9460	0.0114	0.0530	0.7105	0
WOOD	2025	0.3743	0	0.0116	0.9917	0.0116	0.0082	0.7105	0
PSGO	2018	0.3390	0	0.0849	0.7639	0.0849	0.1458	0.4138	0
PSGO	2019	0.1865	0	0.0849	0.7639	0.0849	0.1458	0.4138	0
PSGO	2020	0.1940	0	0	0.7639	0	0.1451	0.4138	0
PSGO	2021	0.1494	0	0	0.7643	0	0.1451	0.4138	0
PSGO	2022	0.1910	0	0.0849	0.7643	0.0849	0.1450	0.4138	0
PSGO	2023	0.1673	0	0.0849	0.7655	0.0849	0.1238	0.4350	0
PSGO	2024	0.2015	0	0.0849	0.8007	0.0849	0.1086	0.4502	0
PSGO	2025	0.2024	0	0.0849	0.8007	0.0849	0.0662	0.4502	0
ICBP	2018	0.2773	0	0	0.1752	0	0.8046	0.5007	1
ICBP	2019	0.2793	0	0	0.8887	0	0.1091	0.5007	1
ICBP	2020	0.2551	0	0	0.8857	0	0.0929	0.5007	1
ICBP	2021	0.2048	0	0	0.8796	0	0.0950	0.5007	1
ICBP	2022	0.2396	0	0	0.8602	0	0.1302	0.5007	1
ICBP	2023	0.2603	0	0	0.8734	0	0.1140	0.5007	1
ICBP	2024	0.2336	0	0	0.8614	0	0.1286	0.5007	1
ICBP	2025	0.2335	0	0	0.8601	0	0.1307	0.5007	1
INDF	2018	0.2334	0	0	0.1752	0.0002	0.8046	0.5007	1
INDF	2019	0.3254	0	0	0.1585	0.0002	0.8256	0.5007	1
INDF	2020	0.2957	0	0	0.1635	0.0002	0.8015	0.5007	1
INDF	2021	0.2249	0	0	0.1591	0.0002	0.7980	0.5007	1
INDF	2022	0.2538	0	0	0.1463	0.0002	0.8196	0.5007	1
INDF	2023	0.2639	0	0	0.1386	0.0002	0.8094	0.5007	1
INDF	2024	0.2325	0	0	0.1165	0.0002	0.8487	0.5007	1
INDF	2025	0.1498	0	0	0.1365	0.0002	0.8487	0.5007	1
MLBI	2018	0.2674	0	0	0.2137	0	0.9236	0	0
MLBI	2019	0.2585	0	0	0.0520	0	0.9317	0	0
MLBI	2020	0.2796	0	0	0.0504	0	0.9318	0	0
MLBI	2021	0.2238	0	0	0.0344	0	0.9407	0	0
MLBI	2022	0.2370	0	0	0.0344	0	0.9432	0	0
MLBI	2023	0.2584	0	0	0.0344	0	0.9497	0	0
MLBI	2024	0.2111	0	0	0.0777	0	0.9459	0	0
MLBI	2025	0.2371	0	0	0.0113	0	0.9571	0	0
MYOR	2018	0.3391	0	0	0.6689	0.2535	0.0803	0.8431	1
MYOR	2019	0.3106	0	0	0.6649	0.2535	0.0779	0.8431	1
MYOR	2020	0.3007	0	0	0.0636	0.2535	0.0862	0.8431	0
MYOR	2021	0.2185	0	0	0.0433	0.2535	0.1048	0.8431	0
MYOR	2022	0.2214	0	0	0.0645	0.2535	0.0849	0.8431	0
MYOR	2023	0.2074	0	0	0.0739	0.2535	0.0742	0.8431	0
MYOR	2024	0.2096	0	0	0.0720	0.2535	0.0781	0.8431	0
MYOR	2025	0.2096	0	0	0.0718	0.2535	0.0781	0.8431	0
ROTI	2018	0.3197	0	0	0.2951	0	0.6983	0.2577	0
ROTI	2019	0.3186	0	0	0.3454	0	0.6443	0.2577	0

ROTI	2020	0.2515	0	0	0.2909	0	0.7014	0.2577	0
ROTI	2021	0.2518	0	0	0.3122	0	0.6805	0.2577	0
ROTI	2022	0.2454	0	0	0.3405	0	0.6544	0.2577	0
ROTI	2023	0.2212	0	0	0.3415	0	0.6506	0.2577	0
ROTI	2024	0.2276	0	0	0.3252	0	0.6405	0.2577	0
ROTI	2025	0.2297	0	0	0.3495	0	0.6368	0.2577	0
CAMP	2018	0.2629	0	0	0.0020	0.0388	0.0007	0.8388	0
CAMP	2019	0.1229	0	0	0.0020	0.0388	0.0007	0.8388	0
CAMP	2020	0.2248	0	0	0.0010	0.0388	0.0004	0.8388	0
CAMP	2021	0.2068	0	0	0.0020	0.0388	0.0004	0.8388	0
CAMP	2022	0.2043	0	0	0.0010	0.0086	0.0019	0.8388	0
CAMP	2023	0.2207	0	0	0.0010	0.0152	0.0021	0.8394	0
CAMP	2024	0.2155	0	0	0.0023	0.0152	0.0070	0.8394	0
CAMP	2025	0.2036	0	0	0.0026	0.0152	0.0023	0.8394	0
HOKI	2018	0.2551	0	0	0.8257	0.015	0.0079	0.6495	0
HOKI	2019	0.2705	0	0	0.8408	0.015	0.0079	0.6495	0
HOKI	2020	0.2523	0	0	0.8257	0.0148	0.0033	0.6495	0
HOKI	2021	0.3067	0	0	0.8373	0.0162	0.0020	0.6495	0
HOKI	2022	0.3632	0	0	0.8390	0.4189	0.0014	0.6495	0
HOKI	2023	0.3578	0	0	0.8373	0.0159	0.0020	0.6495	0
HOKI	2024	0.2523	0	0	0.8373	0.0122	0.0020	0.6495	0
HOKI	2025	0.3036	0	0	0.1600	0.0162	0.0020	0.6495	0
DLTA	2018	0.2337	0.2625	0	0.0512	0.002	0.0693	0	1
DLTA	2019	0.2243	0.2625	0	0.0463	0.002	0.0738	0	1
DLTA	2020	0.2504	0.2625	0	0.0459	0.002	0.0707	0	1
DLTA	2021	0.2195	0.2625	0	0.0417	0.002	0.0609	0	1
DLTA	2022	0.2180	0.2625	0	0.0353	0.002	0.0509	0	1
DLTA	2023	0.2051	0.2625	0	0.0336	0.002	0.0470	0	1
DLTA	2024	0.2117	0.2625	0	0.0313	0.002	0.0456	0	1
DLTA	2025	0.2496	0.2625	0	0.0313	0.002	0.0456	0	1
SKLT	2018	0.2924	0	0	0.3872	0.0086	0.5901	0.6907	0
SKLT	2019	0.2085	0	0	0.3072	0.0086	0.5901	0.6907	0
SKLT	2020	0.1206	0	0	0.3876	0.0086	0.4562	0.6907	0
SKLT	2021	0.4083	0	0	0.8676	0.5086	0.5901	0.6907	0
SKLT	2022	0.1219	0	0	0.3676	0.0086	0.5901	0.6907	0
SKLT	2023	0.2304	0	0	0.3862	0.0054	0.5958	0.6907	0
SKLT	2024	0.2255	0	0	0.5901	0.0054	0.3876	0.6907	0
SKLT	2025	0.2490	0	0	0.3191	0.002	0.6616	0.6907	0
STTP	2018	0.2144	0	0	0.5884	0	0.1425	0.5676	0
STTP	2019	0.2050	0	0	0.5884	0	0.1425	0.5676	0
STTP	2020	0.1874	0	0	0.5884	0	0.0470	0.5676	0
STTP	2021	0.1929	0	0	0.5884	0.0319	0.0470	0.5676	0
STTP	2022	0.1747	0	0	0.5884	0.0319	0.0470	0.5676	0
STTP	2023	0.1676	0	0	0.5883	0.03186	0.0470	0.5676	0
STTP	2024	0.1627	0	0	0.5883	0.0319	0.0470	0.5676	0
STTP	2025	0.1695	0	0	0.5883	0.0319	0.0470	0.5676	0

ULTJ	2018	0.3029	0	0	0.3630	0.3451	0.0267	0.5591	0
ULTJ	2019	0.1956	0	0	0.5266	0.3507	0.0267	0.5591	0
ULTJ	2020	0.2194	0	0	0.3696	0.4818	0.0267	0.6956	0
ULTJ	2021	0.1720	0	0	0.3696	0.4846	0.0267	0.6986	0
ULTJ	2022	0.2510	0	0	0.3627	0.4876	0.0267	0.7016	0
ULTJ	2023	0.2130	0	0	0.2372	0.4876	0.1083	0.7016	0
ULTJ	2024	0.2343	0	0	0.5428	0.545	0.0977	0.7828	0
ULTJ	2025	0.1759	0	0	0.4528	0.545	0.0955	0.7828	0
CLEO	2018	0.2224	0	0	0.9822	0.015	0.0094	0.5567	0
CLEO	2019	0.2427	0	0	0.9823	0.015	0.0094	0.5567	0
CLEO	2020	0.1711	0	0	0.9933	0.015	0.0094	0.5571	0
CLEO	2021	0.1882	0	0	0.9912	0.015	0.0094	0.5567	0
CLEO	2022	0.1912	0	0	0.9839	0.015	0.0094	0.5573	0
CLEO	2023	0.2019	0	0	0.9833	0.015	0.0094	0.5577	0
CLEO	2024	0.2161	0	0	0.9833	0.015	0.0094	0.5579	0
CLEO	2025	0.3004	0	0	0.9118	0.0052	0.0094	0.5612	0
DMND	2018	0.2541	0	0	0.0063	0.3963	0.1999	0.3963	1
DMND	2019	0.2541	0	0	0.0063	0.3963	0.1999	0.3963	1
DMND	2020	0.2307	0	0	0.0063	0.3963	0.1999	0.3963	1
DMND	2021	0.2188	0	0	0.0063	0.3963	0.1999	0.3963	1
DMND	2022	0.2339	0	0	0.0062	0.3963	0.1999	0.3964	1
DMND	2023	0.1846	0	0	0.0062	0.3963	0.2693	0.3963	1
DMND	2024	0.2188	0	0	0.0062	0.3493	0.2693	0.3963	1
DMND	2025	0.2047	0	0	0.0062	0.3493	0.2694	0.3963	1
KEJU	2018	0.3237	0	0	0.8650	0	0.0100	0.6607	0
KEJU	2019	0.3176	0	0	0.8650	0	0.0100	0.6607	0
KEJU	2020	0.1770	0	0	0.7111	0	0.2250	0.6607	0
KEJU	2021	0.2100	0	0	0.7107	0	0.2250	0.6607	0
KEJU	2022	0.2196	0	0	0.7248	0.003	0.2250	0.6607	0
KEJU	2023	0.2198	0	0	0.7261	0.0039	0.2251	0.6607	0
KEJU	2024	0.2103	0	0	0.7261	0.003	0.2251	0.6607	0
KEJU	2025	0.2079	0	0	0.0144	0.003	0.2254	0.6607	0
GOOD	2018	0.2696	0	0	0.2397	0.1026	0.1954	0.5757	1
GOOD	2019	0.2494	0	0	0.2279	0.102	0.2056	0.5757	1
GOOD	2020	0.2791	0	0	0.2239	0.1057	0.2005	0.5757	1
GOOD	2021	0.2213	0	0	0.2270	0.1052	0.2059	0.5757	1
GOOD	2022	0.2262	0	0	0.2147	0.0924	0.3025	0.5757	1
GOOD	2023	0.2319	0	0	0.1952	0.171	0.3119	0.5757	1
GOOD	2024	0.1999	0	0	0.1104	0.187	0.3119	0.5757	1
GOOD	2025	0.3024	0	0	0.1123	0.189	0.3122	0.5757	1
CEKA	2018	0.2206	0	0	0.9733	0	0.0605	0.8702	0
CEKA	2019	0.1232	0	0	0.1727	0	0.0577	0.8702	0
CEKA	2020	0.2806	0	0	0.1727	0.0002	0.0572	0.8702	0
CEKA	2021	0.2727	0	0	0.8724	0.0002	0.0562	0.8702	0
CEKA	2022	0.3006	0	0	0.8721	0	0.0562	0.8702	0
CEKA	2023	0.2157	0	0	0.8716	0	0.0559	0.8702	0

CEKA	2024	0.2127	0	0	0.8728	0	0.0559	0.8702	0
CEKA	2025	0.2702	0	0	0.8717	0	0.0561	0.8702	0
IKAN	2018	0.3086	0	0	0.3352	0.2648	0.0014	0.3352	0
IKAN	2019	0.2909	0	0	0.3352	0.2648	0.0018	0.3352	0
IKAN	2020	0.1889	0	0	0.3356	0.2648	0.0015	0.3352	0
IKAN	2021	0.2499	0	0	0.3356	0.2648	0.0015	0.3352	0
IKAN	2022	0.1796	0	0	0.3352	0.2648	0.0016	0.3352	0
IKAN	2023	0.2522	0	0	0.3352	0.2648	0.0011	0.3352	0
IKAN	2024	0.1844	0	0	0.3356	0.2648	0.0011	0.3352	0
IKAN	2025	0.2457	0	0	0.3352	0.1808	0.0004	0.3352	0

Lampiran (Hasil Output E-views)

- **Analisis Deskriptif**

	ETR	GO	BO	IO	MO	FO	FAM	PC
Mean	0.218925	0.114014	0.354158	0.476036	0.064301	0.203441	0.384158	0.108602
Median	0.210000	0.000000	0.310000	0.377900	0.000000	0.090000	0.450000	0.000000
Maximum	0.380000	0.640000	0.690000	0.999058	0.580000	0.680000	0.650000	0.300000
Minimum	0.070000	0.000000	0.000000	0.000130	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.047623	0.227284	0.261402	0.374835	0.131563	0.233610	0.218939	0.144433
Observations	280	280	280	280	280	280	280	280

- **Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.532424	(34,237)	0.0000
Cross-section Chi-square	86.464657	34	0.0000

- **Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

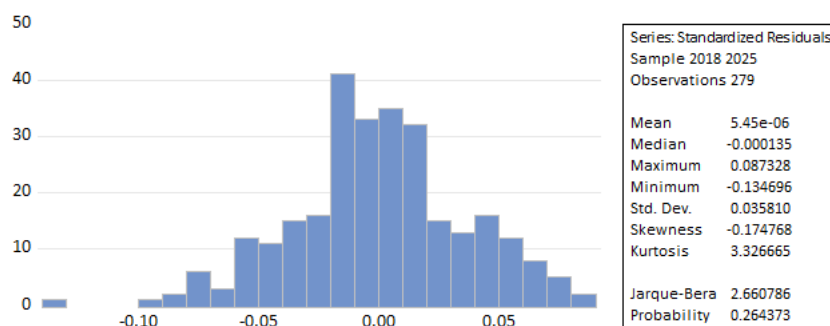
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.922876	7	0.2359

- **Uji LM**

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	19.29245 (0.0000)	16.45982 (0.0000)	35.75227 (0.0000)
Honda	4.392317 (0.0000)	4.057070 (0.0000)	5.974619 (0.0000)
King-Wu	4.392317 (0.0000)	4.057070 (0.0000)	5.509429 (0.0000)
Standardized Honda	5.481579 (0.0000)	4.455430 (0.0000)	2.175403 (0.0148)
Standardized King-Wu	5.481579 (0.0000)	4.455430 (0.0000)	2.439430 (0.0074)
Gourieroux, et al.	--	--	35.75227 (0.0000)

- **Uji Normalitas**



- **Uji Multikolinearitas**

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
X1	1.000000	0.235771	0.092737	-0.157482	-0.270852	-0.101561	0.319019
X2	0.235771	1.000000	0.769981	-0.246196	-0.550771	0.316467	-0.003428
X3	0.092737	0.769981	1.000000	-0.084994	-0.504191	0.307440	0.068979
X4	-0.157482	-0.246196	-0.084994	1.000000	-0.217825	0.125470	-0.087140
X5	-0.270852	-0.550771	-0.504191	-0.217825	1.000000	-0.423322	-0.014633
X6	-0.101561	0.316467	0.307440	0.125470	-0.423322	1.000000	-0.258331
X7	0.319019	-0.003428	0.068979	-0.087140	-0.014633	-0.258331	1.000000

- **Uji Heteroskedasititas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.830506	Prob. F(7,272)	0.0815
Obs*R-squared	12.59699	Prob. Chi-Square(7)	0.0826
Scaled explained SS	12.44949	Prob. Chi-Square(7)	0.0867

- **Uji t**

Dependent Variable: ETR
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/27/26 Time: 14:29
Sample: 2018 2025
Periods included: 8
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 280
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.175165	0.013810	12.68361	0.0000
X1	0.111853	0.013772	8.121709	0.0000
X2	0.067868	0.020130	0.371511	0.9938
X3	0.000352	0.003009	0.117111	0.9069
X4	0.104590	0.019301	5.418732	0.0000
X5	0.067450	0.017356	3.886298	0.0001
X6	-0.032133	0.011375	-2.824828	0.0051
X7	0.007603	0.007227	1.051976	0.0293

- **Uji F**

Root MSE	0.035636	R-squared	0.438029
Mean dependent var	0.218925	Adjusted R-squared	0.423513
S.D. dependent var	0.047623	S.E. of regression	0.036158
Sum squared resid	0.354310	F-statistic	30.17591
Durbin-Watson stat	1.707222	Prob(F-statistic)	0.000000

- **Uji Koefisien Dereminasi**

Root MSE	0.035636	R-squared	0.438029
Mean dependent var	0.218925	Adjusted R-squared	0.423513
S.D. dependent var	0.047623	S.E. of regression	0.036158
Sum squared resid	0.354310	F-statistic	30.17591
Durbin-Watson stat	1.707222	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran Populasi

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
2	ALTO	PT Tri Banyan Tirta Tbk
3	CAMP	PT Campina Ice Ccream Industry Tbk
4	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
5	CLEO	<u>PT Sariguna Primatirta Tbk</u>
6	COCO	PT Wahana Interfood Nusantara Tbk
7	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
8	DMND	PT Diamond Food Indonesia Tbk
9	FOOD	PT Sentra Food Indonesia Tbk
10	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
11	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
12	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13	IKAN	PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
14	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
15	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk
16	MLI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
17	MYOR	PT Mayora Indah TBK
18	PANI	PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk
19	PCAR	PT Prima Cakralawa Abadi Tbk
20	PSDN	PT Prashida Aneka Niaga Tbk
21	PSGO	PT Palma Serasih Tbk
22	ROTI	PT Nippon Indosari Corporindo Tbk
23	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
24	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
25	STTP	PT Siantar Top Tbk
26	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
27	GGRM	<u>PT Gudang Garam Tbk</u>
28	HMSP	PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk
29	ITIC	PT Indonesia Tobacco Tbk
30	RMBA	PT Bentoel International Investama Tbk
31	WIIM	PT Wismilak Inti Makmur Tbk
32	DVLA	PT Darya Variaio Laboratoria Tbk
33	INAF	PT Indofarma (Persero) Tbk
34	KAEF	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
35	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
36	MERK	PT Merck Indonesia Tbk
37	PEHA	PT Phapros Tbk,PT
38	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
39	SIDO	<u>Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk</u>
40	TSPC	PT Pasific Tbk
41	ADES	PT Akasha Wira International Tbk

42	KINO	PT Kino Indonesia Tbk
43	KPAS	PT Cottonindo Ariesta Tbk
44	MBTO	PT Martina Berto Tbk
45	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk
46	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
47	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
48	CNIT	PT Chitose International Tbk
49	KICI	PT Kedaung Indah Can Tbk
50	LMPI	PT Langgeng Makmur Industry Tbk
51	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk

Lampiran Sampel

No	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	INAF	PT Indofarma Tbk.
2	KAEF	PT Kimia Farma Tbk.
3	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk.
4	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
5	SIDO	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
6	DVLA	PT Darya Varia Laboratoria Tbk
7	MERK	PT Merck Indonesia Tbk
8	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
9	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
10	HMSP	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
11	ITIC	PT Indonesia Tobacco Tbk
12	WIIM	PT Wismilak Inti Makmur Tbk
13	KINO	PT Kino Indonesia Tbk
14	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
15	MRAT	PT Mustika Ratu Tbk
16	ADES	PT Akasha Wira International Tbk
17	WOOD	PT Integra Indocabinet Tbk
18	PSGO	PT Palma Serasih Tbk
19	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
20	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
21	MLBI	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
22	MYOR	PT Mayora Indah Tbk
23	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
24	CAMP	PT Campina Ice Cream Industry Tbk
25	HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
26	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk.
27	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
28	STTP	PT Siantar Top Tbk
29	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk

30	CLEO	PT Sariguna Primatirta Tbk
31	DMND	PT Diamond Food Indonesia Tbk
32	KEJU	PT Mulia Boga Raya Tbk
33	GOOD	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
34	CEKA	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
35	IKAN	PT Era Mandiri Cemerlang Tbk

Lampiran (Biodata Penulis)

Biodata Penulis

Nama : Dianya Mutiara Ramadhani
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01 November 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Asal : Villa Nusa Indah II, Bogor, Jawa Barat
 Alamat Tinggal : Pondok Alam Sigura-gura, Malang, Jawa Timur
 No HP : 085882074666
 E-mail : mutiaradianyaa@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2010 : TK Islam Al-Hasanah
 2010-2016 : SD Negeri 02 Bojongsukur
 2016-2019 : MTs Negeri 2 Kota Bekasi
 2019-2022 : SMK Islam Terpadu Bina Husada Mandiri
 2022-2026 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Formal

2022-2023 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2022-2023 : PKPBA (Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi dan Magang

1. Staff of Networking Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi
2. Relawan Pajak
3. Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta Bidang PAKIS

Sertifikasi dan Pelatihan

1. Certified Accurate Professional (CAP)
2. Pelatihan ATLAS (Software Auditing)
3. Pelatihan Brevet Pajak A & B



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 220502110119
 Nama : Dianya Mutiara Ramadhani
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Novi Lailiyul Wafiroh, M.A
 Judul Skripsi : **PERAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI
 POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAMANUFAKTUR
 SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
 INDONESIA PERIODE 2018–2025**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	23 September 2025	Membahas judul skripsi dari outline yang sudah di upload	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	13 Maret 2026	Membahas kembali terkait judul skripsi	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	30 Maret 2026	Membahas terkait literatur review 15 jurnal penelitian terdahulu	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	14 April 2026	Membahas terkait isi bab 1-3 dan membahas definisi operasional untuk di bab 3	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	4 Mei 2026	Membahas dan meninjau bab 1-3 dengan kompleks dan membahas juga perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2025	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	13 Mei 2026	Finalisasi Bab I sampai Bab III serta pengecekan keseluruhan skripsi sebelum pengajuan proposal	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

7	2 Juni 2026	Revisi terkait Seminar Proposal	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	13 Juni 2026	Bimbingan terkait untuk melanjutkan bab 4 dan bab 5	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	19 Juni 2026	Finalisasi Bab IV dan Bab V serta pengecekan keseluruhan skripsi sebelum pengajuan sidang	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 19 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Novi Lailiyul Wafiroh, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd

NIP : 198409302023211006

Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Dianya Mutiara Ramadhani

NIM : 220502110119

Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : **PERAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KONEKSI
POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI
BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2018–2025**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS
PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
13%	9%	4%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2026 UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd